

SIDIK

SISTEM INFORMASI DATA INDEKS KERENTANAN



DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JAKARTA

SIDIK

SISTEM INFORMASI DATA INDEKS KERENTANAN



**DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JAKARTA
2015**

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

ISBN: 978-602-74644-0-7

@Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK),
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Jakarta Indonesia

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Mangala Wanabakti Blok VII, Lantai 12

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta-Indonesia

Telp.: (021) 5747053; E-mail: subdit1.api.ppi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim membangun Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Hasil data dan informasi SIDIK tersebut kemudian disusun dalam sebuah buku Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Metode penentuan kelas kerentanan menggunakan metode perhitungan indeks sensitifitas, indeks keterpaparan dan indeks kemampuan adaptasi. Indikator yang digunakan dalam menghitung kerentanan adalah 9 indikator dari data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik/BPS 2011. Indikator untuk Indeks Sensitivitas dan Keterpaparan adalah Jumlah Kepala Keluarga Tinggal di Bantaran Sungai, Bangunan Bantaran Sungai, Sumber Air Minum, Kemiskinan, dan Sumber Penghasilan. Sedangkan indikator untuk Indeks Kapasitas Adaptasi yaitu Fasilitas Listrik, Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur Jalan. Data kerentanan nasional ini akan diperbaharui setiap 3 tahun berdasarkan data Podes BPS terbaru. Data kerentanan ini bersifat indikatif sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas rencana, aksi, serta strategi adaptasi tiap sektor.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim. Semoga buku ini juga bermanfaat bagi berbagai pihak terkait.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Jenderal

Pengendalian Perubahan Iklim



Nur Masripatin

NIP. 19580108 198603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
II. METODE PENYUSUNAN	3
A. Data	3
B. Metode	3
C. Tahapan Kegiatan	6
III. DATA KERENTANAN INDONESIA	11
A. Kerentanan Nasional	11
B. Kerentanan Provinsi	14
VI. PENUTUP	57
Lampiran	59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Pembobotan pada indikator Jumlah KK, Bangunan, Sumber Air Minum, Kemiskinan dan Sumber Penghasilan	5
Tabel 2	Pembobotan pada indikator Listrik, Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Infrastruktur Jalan	5
Tabel 3	Jumlah Desa yang Rentan Perubahan Iklim Di Indonesia	12
Tabel 4	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Aceh	15
Tabel 5	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Utara	16
Tabel 6	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 7	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Riau	19
Tabel 8	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kep. Riau	20
Tabel 9	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jambi	21
Tabel 10	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 11	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bengkulu	24
Tabel 12	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bangka Belitung	25
Tabel 13	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Lampung	26
Tabel 14	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Banten	27
Tabel 15	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi DKI	28
Tabel 16	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Barat	29
Tabel 17	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Tengah	30
Tabel 18	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi DIY	32
Tabel 19	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Timur	33
Tabel 20	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bali	35
Tabel 21	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	36
Tabel 22	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	37
Tabel 23	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Barat	38
Tabel 24	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Tengah	39
Tabel 25	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Selatan	41
Tabel 26	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Timur	42
Tabel 27	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Utara	43
Tabel 28	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Utara	44
Tabel 29	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Tengah	45
Tabel 30	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Selatan	46
Tabel 31	Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Tenggara	48

Tabel 32 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Gorontalo 49

Tabel 33 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Barat 50

Tabel 34 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Maluku 51

Tabel 35 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Maluku Utara 52

Tabel 36 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Papua Barat 53

Tabel 37 Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Papua 54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Diagram Alir Perhitungan Kerentanan	4
Gambar 2 Proses input dan output indeks kerentanan	6
Gambar 3 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim berbasis Desa Seluruh Indonesia	11
Gambar 4 Persentase Jumlah Kerentanan Desa berdasarkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim per Provinsi	12
Gambar 5 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Aceh	14
Gambar 6 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Utara	16
Gambar 7 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Barat	18
Gambar 8 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Riau	19
Gambar 9 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kep. Riau	20
Gambar 10 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jambi	21
Gambar 11 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Selatan	22
Gambar 12 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bengkulu	23
Gambar 13 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bangka Belitung	24
Gambar 14 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Lampung	25
Gambar 15 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Banten	26
Gambar 16 Persentase Kerentanan Desa Provinsi DKI	27
Gambar 17 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Barat	28
Gambar 18 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Tengah	30
Gambar 19 Persentase Kerentanan Desa Provinsi DIY	31
Gambar 20 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Timur	32
Gambar 21 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bali	34
Gambar 22 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat ...	35
Gambar 23 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ..	36
Gambar 24 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Barat	38
Gambar 25 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	39
Gambar 26 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	40
Gambar 27 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Timur	42
Gambar 28 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Utara	43

Gambar 29 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Utara 44

Gambar 30 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Tengah 45

Gambar 31 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Selatan 46

Gambar 32 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara 47

Gambar 33 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Gorontalo 49

Gambar 34 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Barat 50

Gambar 35 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Maluku 51

Gambar 36 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Maluku Utara 52

Gambar 37 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Papua Barat 53

Gambar 38 Persentase Kerentanan Desa Provinsi Papua 54

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang digunakan dalam pada RPJMN 2015-2019 yaitu *economically feasible, socially acceptable, environmentally sustainable*. Untuk menerapkan prinsip tersebut membutuhkan prasyarat yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola adalah pada bidang SDA alam dan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut.

Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau.

Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan

ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi sertapengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penerbitan buku ini adalah untuk menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim. Adapun tujuan penyusunan buku ini adalah menyediakan data dan informasi mengenai tingkat kerantanan perubahan iklim berupa Indeks yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan dan yang adaptif terhadap adaptasi perubahan iklim.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku ini mencakup :

1. Pendahuluan
2. Metode Penyusunan
3. Data Kerentanan Nasional.
4. Data Kerentanan Provinsi.
5. Penutup

METODE PENYUSUNAN

A. Data

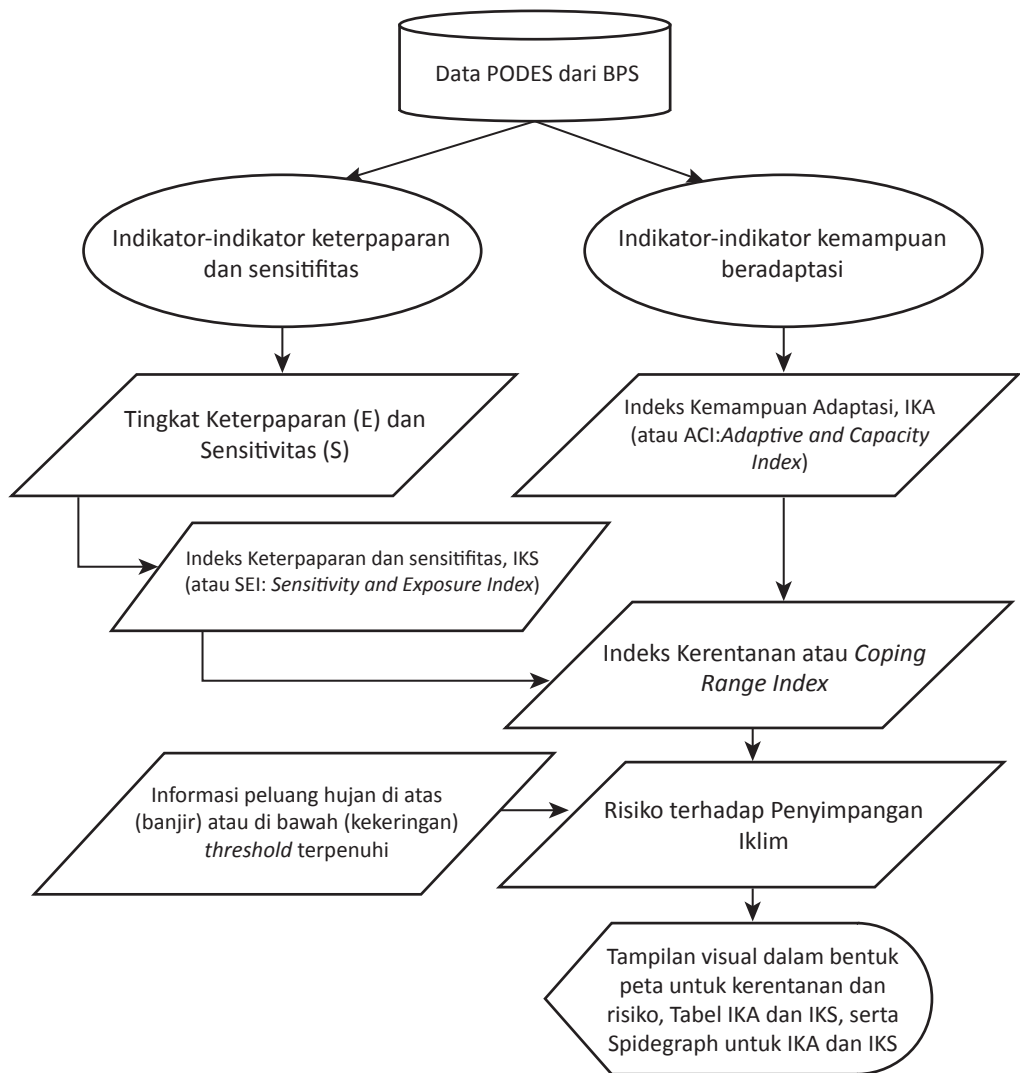
Data yang digunakan dalam kegiatan ini penyusunan data kerentanan nasional ini diantaranya adalah:

1. Peta administrasi desa Nasional (sumber BPS, 2011)
2. Data Potensi Desa Tahun 2011
3. Data pengambilan sampel di Kabupaten/Kota

B. Metode

Indeks Kerentanan

Alur data dan informasi pada SIDIK versi 1 disajikan pada Gambar 1. Berdasar sumber data dari PODES, dipilih beberapa peubah yang mencirikan tingkat keterpaparan dan sensitifitas (diformulasikan dalam bentuk indeks, yaitu Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas, IKS) dan tingkat kemampuan beradaptasi (dengan Indeks Kemampuan Adaptif, IKA). IKS semakin tinggi menunjukkan semakin rentan, sedangkan IKA semakin tinggi menunjukkan semakin tidak rentan.



Gambar 1. Diagram Alir Perhitungan Kerentanan.

Tabel 1. Pembobotan pada indikator Jumlah KK, Bangunan, Sumber Air Minum, Kemiskinan dan Sumber Penghasilan

Indikator	Bobot	Jenis	Perhitungan
KK Bantaran Sungai	0.1	Nominal	$(R508D)_{\text{desa}} / (R401C)_{\text{desa}}$
Bangunan Bantaran Sungai	0.1	Nominal	$(R508C)_{\text{desa}} / (R401C)_{\text{desa}}$
Sumber Air Minum	0.3	Ordinal	R713A • Jika 1 $\rightarrow$ 0.25 • Jika 2 $\rightarrow$ 0.5 • Jika 3 $\rightarrow$ 0.75 • Jika 4 $\rightarrow$ 0.75 • Jika 5 $\rightarrow$ 1
Kemiskinan	0.3	Nominal	$(R712)_{\text{desa}} / (R401C)_{\text{desa}}$
Sumber Penghasilan	0.2	Ordinal	R403A • Jika 1 $\rightarrow$ 1 • Jika 2 $\rightarrow$ 0.75 • Jika 3 $\rightarrow$ 0.75 • Jika 4 $\rightarrow$ 0.5 • Jika 5 $\rightarrow$ 0.25

Keterangan :

R508C : Jumlah bangunan dibantaran sungai

R508D : Jumlah keluarga dibantaran sungai

R401C : Jumlah keluarga

R713A : Sumber air minum 1(Air kemasan), 2 (PAM), 3 (Pompa listrik), 4 (sumur),5 Mata air

R403A : Sumber penghasilan utama 1(Pertanian), 2 (Tambang), 3 (Industri), 4 (perdagangan), 5 (angkutan dan jasa lainnya)

Tabel 2. Pembobotan pada indikator Listrik, Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Infrastruktur Jalan

Indikator	Bobot	Jenis	Perhitungan
Listrik	0.25	Nominal	$(R501A+R501B)_{\text{desa}} / (R401C)_{\text{desa}}$
Pendidikan	0.3	Nominal	$0.07 * (R701AK2+R701AK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.13 * (R701BK2+R701BK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.2 * (R701CK2+R701CK3)_{\text{kec}} / (R401A+R401B)_{\text{kec}} +$ $0.27 * (R701DK2+R701DK3)_{\text{kec}} / (R401A+R401B)_{\text{kec}} +$ $0.33 * (R701FK2+R701FK3)_{\text{kab}} / (R401A+R401B)_{\text{kab}}$
Fasilitas Kesehatan	0.3	Nominal	$0.2 * (R704DK3+R704EK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.3 * (R704CK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.2 * (R704JK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.1 * (R704GK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}} +$ $0.2 * (R704FK3)_{\text{desa}} / (R401A+R401B)_{\text{desa}}$
Infrastruktur Jalan	0.15	Ordinal	R1001B1 • Jika 1 $\rightarrow$ 1 • Jika 2 $\rightarrow$ 0.75 • Jika 3 $\rightarrow$ 0.5 • Jika 4 $\rightarrow$ 0.25

Keterangan :

R501A : Jumlah pengguna PLN

R501B : Jumlah pengguna Non-PLN

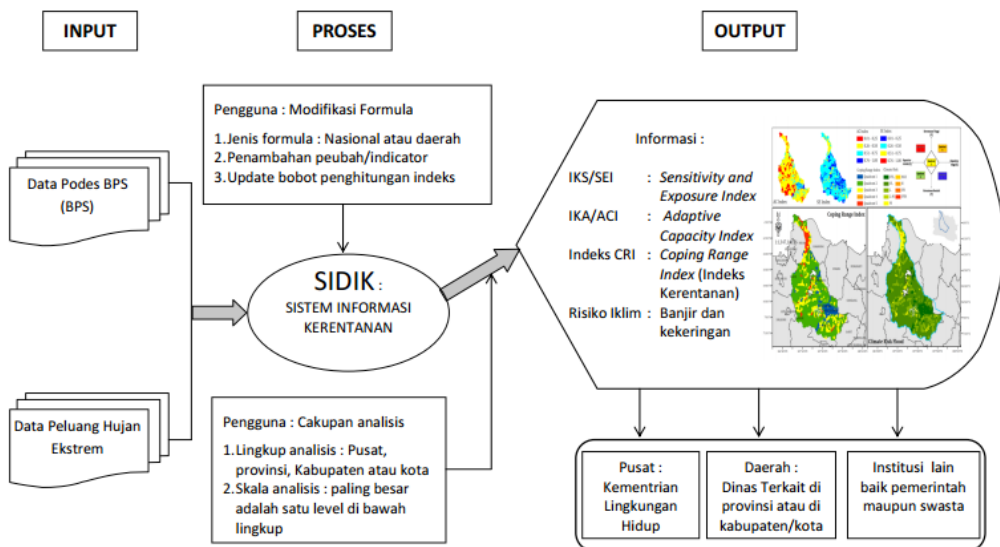
R401C : Jumlah keluarga

R701 : Jenis Pendidikan

R401A : Jumlah penduduk laki-laki R401B: Jumlah penduduk perempuan

R1001B1 : Jenis Permukaan Jalan

Selanjutnya, nilai-nilai indikator ini dikonversi ke rentang 0-1 dengan menggunakan kaidah poersentil-10. Perkalian bobot dan nilai indikator tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IKS dan IKA akhir untuk setiap wilayah. Berdasar nilai IKS dan IKA ini, setiap wilayah dipetakan ke kuadran untuk menentukan tingkat kerentanan wilayah yang dikategorikan seperti disajikan pada Gambar 2. Untuk mendapatkan posisi kuadran setiap wilayah, maka nilai IKS dan IKA diubah ke rentang -05 sd 0.5.



Gambar 2. Proses input dan output indeks kerentanan

C. Tahapan Kegiatan Penyusunan Buku

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

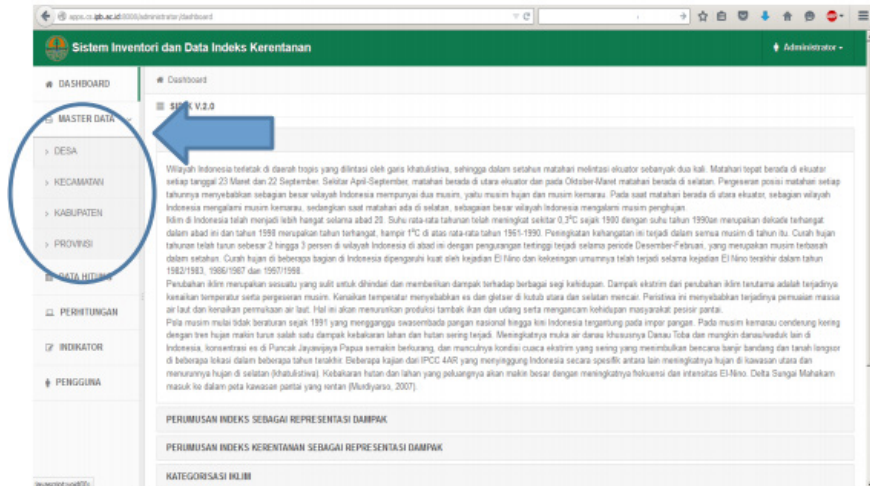
Tahap kegiatan meliputi pengumpulan data diantaranya adalah:

- a. Peta administrasi desa Nasional (sumber BPS, 2011)
- b. Data Potensi Desa Tahun 2011
- c. Data pengambilan sampel di Kabupaten/Kota
- d. Data sekunder lainnya

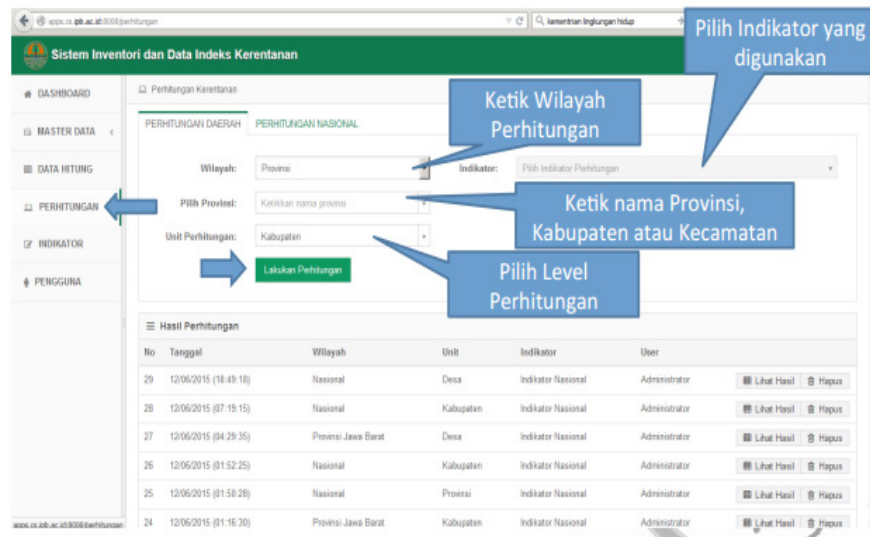
2. Tahap Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data yang dilakukan yaitu melaksanakan *running* data menggunakan aplikasi SIDIK online. Pada tahap ini yang dilakukan adalah:

1. *Loading* data podes tahun 2011.



2. Melakukan perhitungan data nasional per provinsi



3. Memilih jumlah kelas kerentanan menjadi 5 kelas kerentanan

4. Menampilkan hasil perhitungan

3 . Tahap verifikasi hasil perhitungan data.

Pada tahap ini yang dilaksanakan pengambilan data lapangan dengan tujuan mengumpulkan dan melakukan verifikasi data dan informasi mengenai penyusunan data kerentanan nasional di kabupaten/kota. Ruang lingkup kegiatan verifikasi data adalah :

1. Pengambilan data di instansi daerah

Pengambilan data dilakukan dengan cara:

- a. Koordinasi dengan instansi pemerintah di daerah yang menangani kegiatan adaptasi perubahan iklim;
- b. Mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka update data kerentanan nasional untuk mendukung operasionalisasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan;
- c. Mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan data kerentanan nasional di instansi di daerah (provinsi maupun kabupaten) yang menangani dan terkait dengan isu/program/kegiatan adaptasi perubahan iklim;
- d. Mencatat masukan dari berbagai pihak yang terkait.

2. Instansi yang Dihubungi

Instansi yang dapat dihubungi pada pengambilan data antara lain:

- a. Badan Lingkungan Hidup Daerah baik tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten
- b. Bappeda Kab/Kota
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian LHK
- d. UPT lingkup kementerian lain
- e. Lembaga Perguruan Tinggi
- f. Instansi lain yang terkait.

3. Bahan dan Materi yang Dikoordinasikan

Materi yang dibahas dalam rangka Penyusunan Data Kerentanan Nasional, antara lain meliputi :

- a. Konsep adaptasi perubahan iklim, khususnya mengenai konsep kerentanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Indikator kerentanan Nasional
- c. Data dan informasi penyusunan kerentanan nasional terbaru

4. Data/Informasi yang Diperoleh :

- a. Indikator kerentanan nasional yang saat ini digunakan dalam SIDIK
- b. Data/informasi indikator kerentanan nasional
- c. Saran dan usulan dalam penyusunan data kerentanan

4. Tahap Penyajian Hasil

Tahap penyajian hasil berupa tabel data dan peta hasil kerentanan perubahan iklim nasional dan per provinsi

5. Tahap Pelaporan

Tahapan ini adalah tahap penyusunan laporan kegiatan dalam sebuah buku laporan.

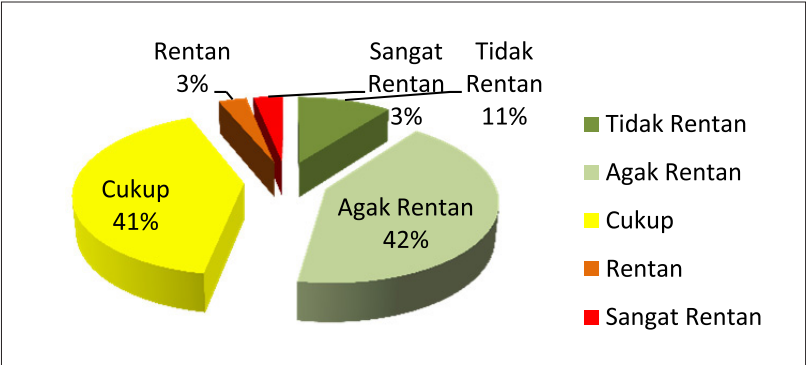
D. Pemanfaatan Informasi Data Indeks Kerentanan

1. Mengunduh peta kerentanan desa yang tersedia dalam SIDIK online.
2. Membaca faktor penyebab kerentanan dan resiko iklim (jika tersedia) menggunakan spidergraph untuk melihat kapasitas adaptasi maupun indeks kerentanannya.
3. Mengidentifikasi faktor penyebab tingkat kerentanan dari 9 indikator yang tersedia di SIDIK online.
4. Memverifikasi hasil peta kerentanan dengan kondisi lapangan dan pihak terkait
5. Mengidentifikasi rencana aksi sesuai dengan penyebab tingkat kerentanan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.
6. Menentukan pilihan adaptasi yang sesuai dan memasukkan dalam program pembangunan.

DATA KERENTANAN NASIONAL

A. Kerentanan Nasional

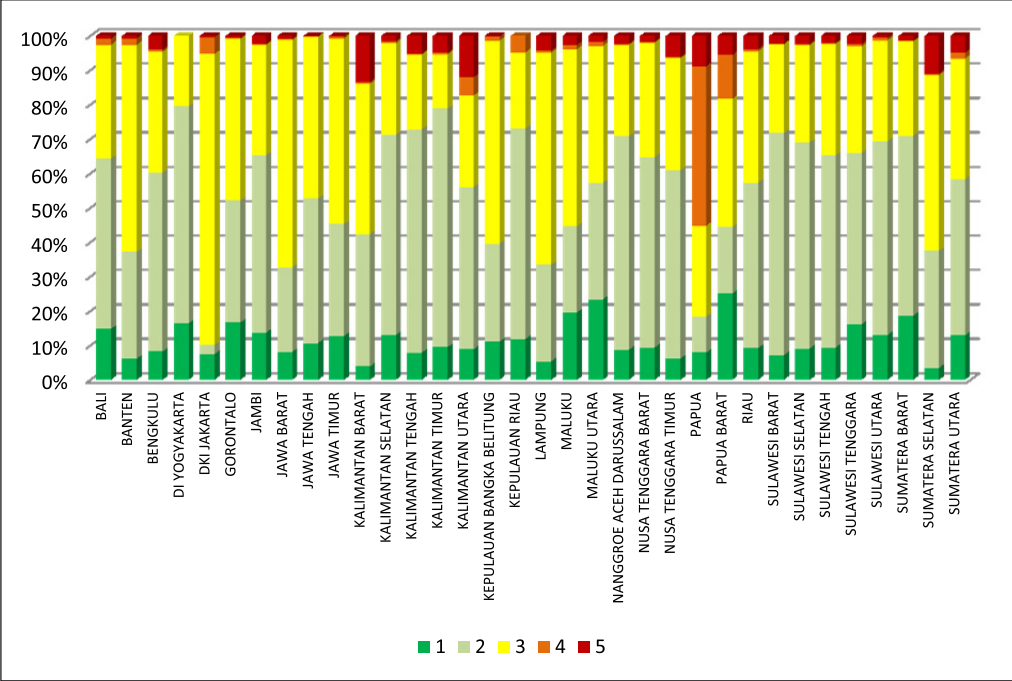
Berdasarkan hasil perhitungan data SIDIK (Sumber data Podes 2011) maka diperoleh bahwa dari total desa di Indonesia yaitu 77.961 terdapat desa yang masuk kategori Sangat Rentan sejumlah 2.507 (3%), dan kategori Rentan sejumlah 2.433 (3%). Desa yang masuk kategori cukup rentan sejumlah 31.875 (41%). Sedangkan desa yang masuk kategori agak rentan sejumlah 32.999 (42%) dan tidak rentan sejumlah 8.146 (8%). Infomasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Tidak Rentan	Agak Rentan	Cukup	Rentan	Sangat Rentan
8.146	32.999	31.876	2.433	2.507

Gambar 3. Indeks Kerentanan Perubahan Iklim berbasis Desa Seluruh Indonesia

Sedangkan berdasarkan distribusinya maka pada provinsi tertentu wilayah yang rentan dan sangat rentan sangat mendominasi dengan persentase lebih dari 50 % seperti di Provinsi Papua. Gambar 4 berikut merupakan gambaran dari kerentanan pada tiap provinsi.



Gambar 4. Persentase Jumlah Kerentanan Desa berdasarkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim per Provinsi

Berdasarkan data tersebut maka pada tiap sektor dan lembaga baik dipusat dan daerah dapat berpartisipasi dalam program pembangunan di desa berdasarkan kewenangan lingkup kerja sektor masing-masing.

Tabel 3. Jumlah Desa yang Rentan Perubahan Iklim Di Indonesia

No	Provinsi	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bali	106	354	237	13	6	716
2	Banten	95	476	924	29	11	1535
3	Bengkulu	125	783	531	9	61	1509
4	Di Yogyakarta	72	276	90			438
5	Dki Jakarta	20	7	226	13	1	267
6	Gorontalo	122	259	343	3	4	731
7	Jambi	189	707	441	2	33	1372
8	Jawa Barat	483	1451	3896	24	51	5905

No	Provinsi	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
9	Jawa Tengah	918	3603	4038	3	15	8577
10	Jawa Timur	1084	2768	4589	41	20	8502
11	Kalimantan Barat	77	757	859	10	264	1967
12	Kalimantan Selatan	261	1163	533	11	32	2000
13	Kalimantan Tengah	121	992	332	3	80	1528
14	Kalimantan Timur	84	610	139	3	44	880
15	Kalimantan Utara	42	223	126	25	57	473
16	Kepulauan Bangka Belitung	40	103	213	4	1	361
17	Kepulauan Riau	42	216	78	17		353
18	Lampung	133	691	1520	14	106	2464
19	Maluku	201	256	528	12	27	1024
20	Maluku Utara	253	365	430	12	19	1079
21	Nanggroe Aceh Darussalam	568	4020	1726	17	152	6483
22	Nusa Tenggara Barat	102	600	361	2	19	1084
23	Nusa Tenggara Timur	185	1620	970	6	185	2966
24	Papua	313	408	1039	1818	346	3924
25	Papua Barat	361	277	537	184	80	1439
26	Riau	153	796	632	10	64	1655
27	Sulawesi Barat	46	412	165		15	638
28	Sulawesi Selatan	273	1784	846	9	70	2982
29	Sulawesi Tengah	171	1014	588	4	38	1815
30	Sulawesi Tenggara	342	1057	656	15	51	2121
31	Sulawesi Utara	221	952	498	11	11	1693
32	Sumatera Barat	72	201	106		6	385
33	Sumatera Selatan	112	1083	1629	13	349	3186
34	Sumatera Utara	751	2628	2036	96	286	5797
Total		8146	32999	31876	2433	2507	77961

Keterangan :

Tingkat Kerentanan :

1. Tidak Rentan

2. Agak Rentan

3. Cukup Rentan

4. Rentan

5. Sangat Rentan

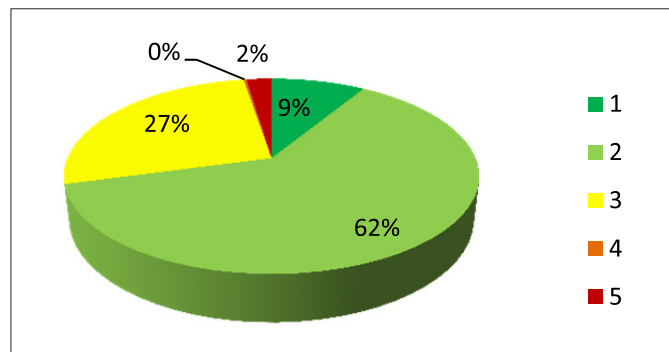
B. Kerentanan Provinsi

1. Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di Pulau Sumatera dengan posisi geografis (2°-6°LU dan 95°-99°BT). Luas wilayah seluas 57.365,57 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.494.410. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya Pertambangan : Pabrik Semen Andalas,Pupuk AAF,Minyak,Emas, dan Perak. Komoditi pertanian diantaranya adalah beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan. Komoditi perkebunan diantaranya coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, pala, nilam, lada, pinang, tebu, tembakau, dan randu.

Beberapa komoditi yang paling banya keluar Aceh tercatat adalah komoditas pertanian, yakni karet 173 juta ton, padi 39 juta ton, pinang 21 juta ton, dan sayur-sayur 177 juta ton. Komoditi lainnya yang keluar dari Aceh adalah coklat 16 juta ton, CPO 28 juta ton, kelapa 2,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Aceh termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Aceh.



Gambar 5. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Aceh

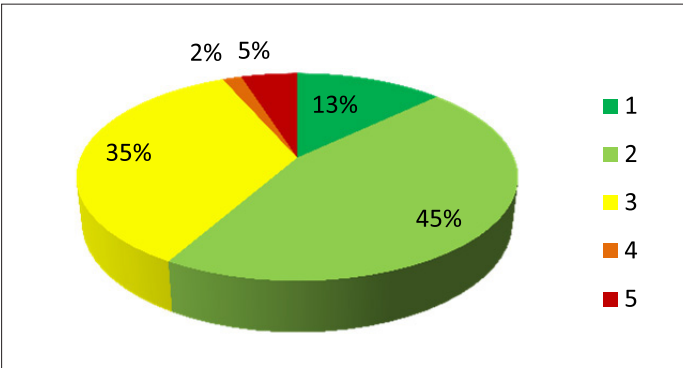
Tabel 4. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Aceh

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Aceh barat	52	215	53		1	321
2	Aceh barat daya	13	88	44	1		146
3	Aceh besar	58	411	129	1	5	604
4	Aceh jaya	33	118	18		2	171
5	Aceh selatan	36	149	59	1	3	248
6	Aceh singkil	24	71	25			120
7	Aceh tamiang	29	104	73	3	4	213
8	Aceh tengah	26	231	31		7	295
9	Aceh tenggara	21	266	76	5	16	384
10	Aceh timur	15	265	198		34	512
11	Aceh utara	41	507	290		15	853
12	Bener meriah	11	186	31		5	233
13	Bireuen	28	322	237		22	609
14	Gayo lues	10	105	25		4	144
15	Kota banda aceh	41	9	39	1		90
16	Kota langsa	10	15	32	4	5	66
17	Kota lhokseumawe	4	22	37	1	4	68
18	Kota sabang	3	12	3			18
19	Kota subulussalam	18	47	9			74
20	Nagan raya	40	123	57		3	223
21	Pidie	32	502	180		17	731
22	Pidie jaya	12	131	74		5	222
23	Simeulue	11	121	6			138
	Jumlah	568	4020	1726	17	152	6483

2. Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak di posisi geografis (1^o-5^oLU dan 97^o-101^oBT). Luas wilayah seluas 71.680 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 12.982.204 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan minyak bumi. Komoditi perkebunan diantaranya karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau, durian.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sumatera Utara.



Gambar 6. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Utara

Tabel 5. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Utara

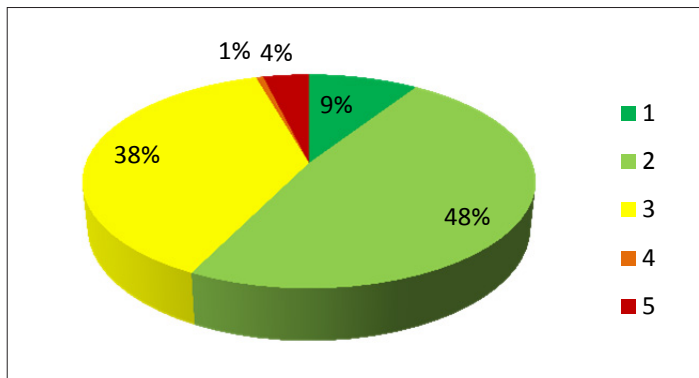
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Asahan	31	93	75		5	204
2	Batu Bara	23	34	43			100
3	Dairi	17	137	11		4	169
4	Deli Serdang	65	126	187	9	2	389
5	Humbang Hasundutan	6	108	35		5	154
6	Karo	44	139	76		10	269
7	Kota Binjai	10	5	22			37
8	Kota Gunungsitoli	4	61	25		11	101
9	Kota Medan	65	2	72	11	1	151
10	Kota Padangsidimpuan	10	39	29		1	79
11	Kota Pematang Siantar	31	10	12			53
12	Kota Sibolga	7	3	7			17
13	Kota Tanjung Balai	3	12	16			31
14	Kota Tebing Tinggi	2	13	20			35
15	Labuhan Batu	18	37	43			98
16	Labuhan Batu Selatan	6	16	32			54
17	Labuhan Batu Utara	22	33	35			90

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
18	Langkat	34	68	168		7	277
19	Mandailing Natal	20	208	141	3	36	408
20	Nias		29	37	8	45	119
21	Nias Barat	11	23	60	4	12	110
22	Nias Selatan	47	66	178	18	47	356
23	Nias Utara	6	20	60	5	22	113
24	Padang Lawas	20	161	99	2	22	304
25	Padang Lawas Utara	54	95	182	35	22	388
26	Pakpak Bharat	5	41	5		1	52
27	Samosir	7	96	14			117
28	Serdang Bedagai	56	97	89		1	243
29	Simalungun	69	212	85		1	367
30	Tapanuli Selatan	22	162	59		5	248
31	Tapanuli Tengah	18	97	53		9	177
32	Tapanuli Utara	8	191	33	1	10	243
33	Toba Samosir	10	194	33		7	244
	Jumlah	751	2628	2036	96	286	5797

3. Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak di posisi geografis (1°LU-4°LS dan 98°-102°BT). Luas wilayah seluas 425.75 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.409.458 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan timah, batubara dan granit. Komoditi perkebunan diantaranya avokad, kacang mete, kayu manis, dan kina.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sumatera Barat.



Gambar 7. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Kepulauan Mentawai		30	9		4	43
2	Kota Bukittinggi	14	6	4			24
3	Kota Padang	22	22	58		2	104
4	Kota Padang Panjang	4	11	1			16
5	Kota Pariaman	7	58	6			71
6	Kota Payakumbuh	12	38	26			76
7	Kota Sawah Lunto	8	28	1			37
8	Kota Solok	5	7	1			13
9	Sijunjung		1				1
	Jumlah	72	201	106		6	385

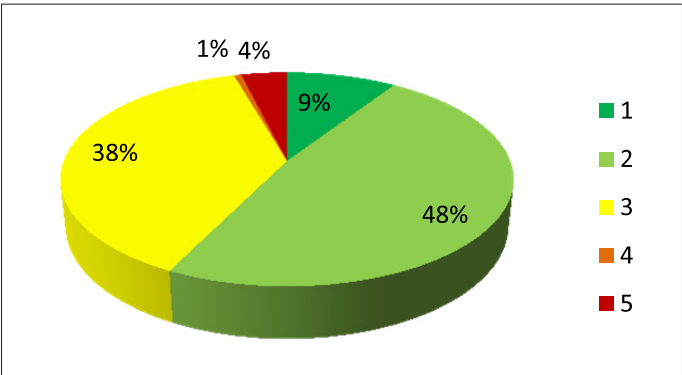
Ket: Kabupaten lain : data tidak disajikan karena

unit berbasis nagari

4. Provinsi Riau

Provinsi Riau terletak di posisi geografis (2°LU-3°LU dan 100°-109°BT). Luas wilayah seluas 94.561 km². dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.409.458 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Minyak Bumi, Emas, Perak, Bauksit. Komoditi perkebunan diantaranya Kelapa sawit, Karet.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Riau termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Riau.



Gambar 8. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Riau

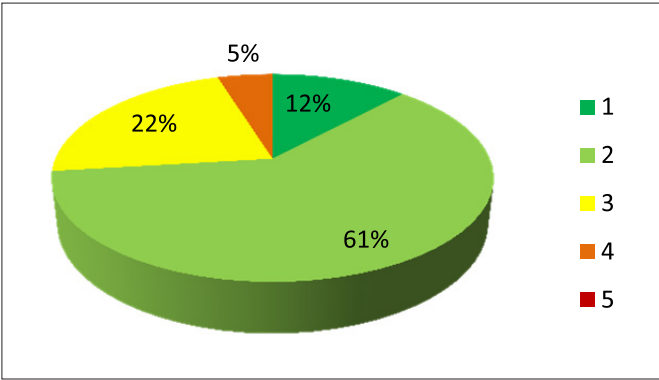
Tabel 7. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bengkalis	8	59	34	1		102
2	Indragiri Hilir	5	73	80	1	33	192
3	Indragiri Hulu	16	77	92		9	194
4	Kampar	18	171	49	2	5	245
5	Kepulauan Meranti	5	49	19			73
6	Kota D U M A I	6	4	21	2		33
7	Kota Pekanbaru	15	5	37	1		58
8	Kuantan Singingi	12	123	71		3	209
9	Pelalawan	10	46	59	1	2	118
10	Rokan Hilir	21	35	87		7	150
11	Rokan Hulu	23	72	53	1	4	153
12	S I A K	14	82	30	1	1	128
	Jumlah	153	796	632	10	64	1655

5. Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Riau terletak di posisi geografis (1°LS-3°LS dan 101°-104°BT). Luas wilayah seluas 13.741 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.685.698 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan batubara. Komoditi perkebunan diantaranya Kelapa, Kopi, Nanas, Cengkeh, Kelapa Sawit.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kep. Riau termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kep. Riau.



Gambar 9. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kepulauan Riau

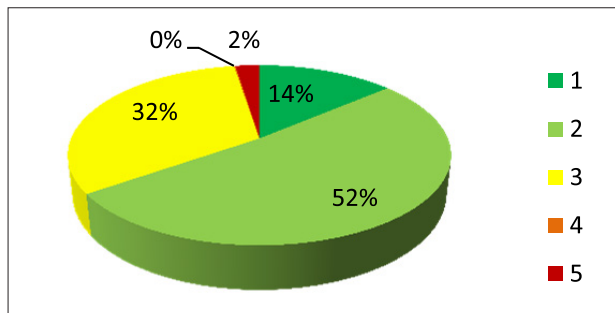
Tabel 8. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kep. Riau

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bintan	4	37	9	1		51
2	Karimun	7	27	20			54
3	Kepulauan Anambas	11	21	4			36
4	Kota B A T A M	10	14	24	16		64
5	Kota Tanjung Pinang	1	4	13			18
6	Lingga	2	49	6			57
7	Natuna	7	64	2			73
	Jumlah	42	216	78	17	0	353

6. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terletak di posisi geografis (1°LS-3°LS dan 101°-105°BT). Luas wilayah seluas 244.477 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 3.092.265 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Batubara, Emas, Minyak Bumi, Timah Putih. Komoditi perkebunan dan pertanian diantaranya kelapa sawit, karet, kedelai, Kol/Kubis, Beras Kerinci, Kentang.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Jambi termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Jambi.



Gambar 10. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jambi

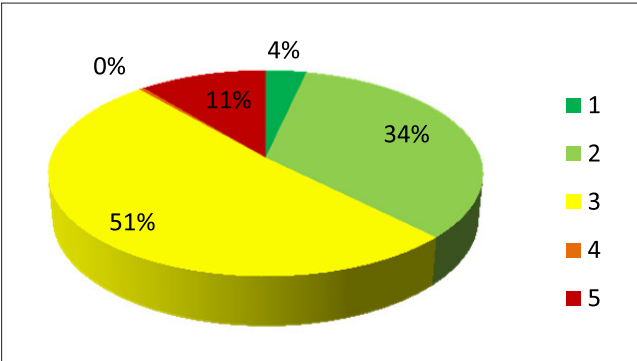
Tabel 9. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Batang Hari	20	66	21	1	5	113
2	Bungo	19	61	66			146
3	Kerinci	15	118	71		4	208
4	Kota Jambi	30	1	31			62
5	Kota Sungai Penuh	6	40	19		4	69
6	Merangin	37	125	48	1	1	212
7	Muaro Jambi	21	71	52		7	151
8	Sarolangun	17	74	49		2	142
9	Tanjung Jabung Barat	6	31	29		4	70
10	Tanjung Jabung Timur	1	65	24		3	93
11	Tebo	17	55	31		3	106
Jumlah		189	707	441	2	33	1372

7. Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terletak di posisi geografis (1^oLS-5^oLS dan 102^o-107^oBT). Luas wilayah seluas 113.339,07 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 7.450.394 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Minyak bumi, Batubara. Komoditi perkebunan utama adalah karet.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sumatera Selatan termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sumatera Selatan .



Gambar 11. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 10. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sumatera Selatan

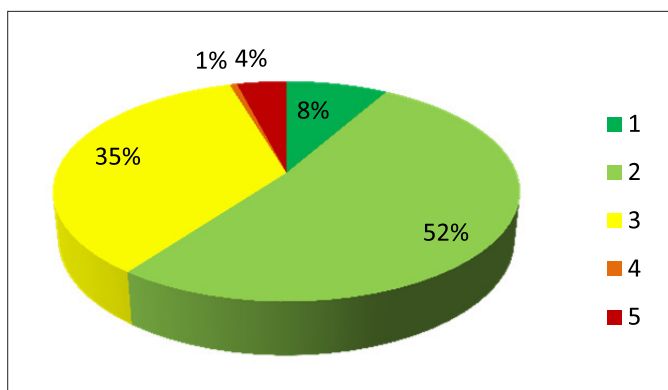
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Banyu Asin	3	76	151	1	73	304
2	Empat Lawang		57	79		20	156
3	Kota Lubuklinggau	7	12	53			72
4	Kota Pagar Alam		16	18		1	35
5	Kota Palembang	13	4	82	6	2	107
6	Kota Prabumulih	1	12	24			37
7	Lahat	12	234	119		11	376
8	Muara Enim	4	97	206		19	326
9	Musi Banyuasin	19	37	164	3	13	236
10	Musi Rawas	10	111	132		24	277

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
11	Ogan Ilir	5	113	68		55	241
12	Ogan Komering Ilir	9	102	142	1	56	310
13	Ogan Komering Ulu	6	51	88		9	154
14	Ogan Komering Ulu Selatan	4	84	116	2	53	259
15	Ogan Komering Ulu Timur	19	77	187		13	296
	Jumlah	112	1083	1629	13	349	3186

8. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak di posisi geografis (2°LS-6°LS dan 101°-104°BT). Luas wilayah seluas 72.078 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.972.196 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Emas dan Perak, Batubara. Komoditi perkebunan utama adalah Kelapa Sawit.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Bengkulu termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Bengkulu.



Gambar 12. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bengkulu

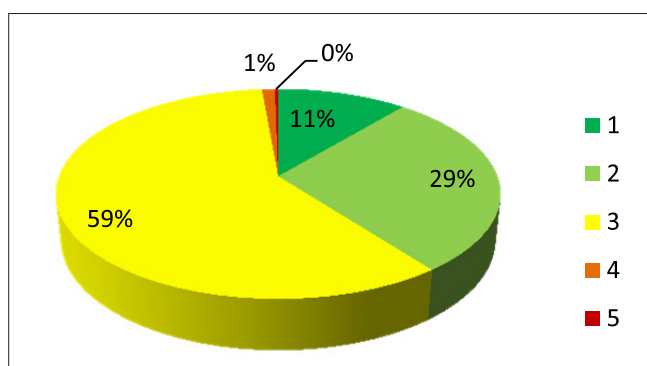
Tabel 11. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bengkulu Selatan	11	101	46		2	160
2	Bengkulu Tengah	15	70	43		6	134
3	Bengkulu Utara	44	76	91	5	9	225
4	Kaur	8	146	37		4	195
5	Kepahiang	2	63	33	2	10	110
6	Kota Bengkulu	14	7	44		2	67
7	Lebong	5	60	38	1	7	111
8	Mukomuko	11	86	50		5	152
9	Rejang Lebong	1	67	80		8	156
10	Seluma	14	107	69	1	8	199
	Jumlah	125	783	531	9	61	1509

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung terletak di posisi geografis (1°LS-4°LS dan 105°-109°BT). Luas wilayah seluas 81.724,74 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.223.296 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Nikel dan timah. Komoditi perkebunan utama adalah Kelapa sawit, Lada, Karet.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Bangka Belitung termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Bangka Belitung.



Gambar 13. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bangka Belitung

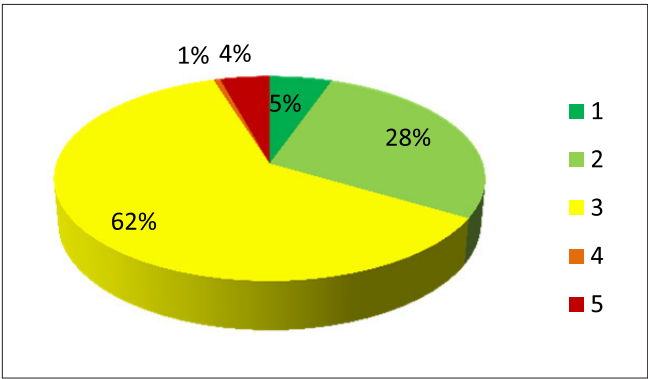
Tabel 12. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bangka Belitung

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bangka	5	24	41			70
2	Bangka Barat	1	37	24	1	1	64
3	Bangka Selatan	4	4	45			53
4	Bangka Tengah	8	11	36	2		57
5	Belitung	7	13	21	1		42
6	Belitung Timur	11	14	14			39
7	Kota Pangkal Pinang	4		32			36
	Jumlah	40	103	213	4	1	361

10. Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terletak di posisi geografis (3°LS-7°LS dan 103°-106°BT). Luas wilayah seluas 35.376,84 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 7.691.007 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Minyak Bumi, Uranium, Batubara Muda, Emas, Marmer. Komoditi perkebunan utama adalah Lada, Kopi, Cengkeh, Coklat, Kelapa sawit, Karet, Jagung, Singkong, Padi, Tebu.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Lampung termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Lampung.



Gambar 14. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Lampung

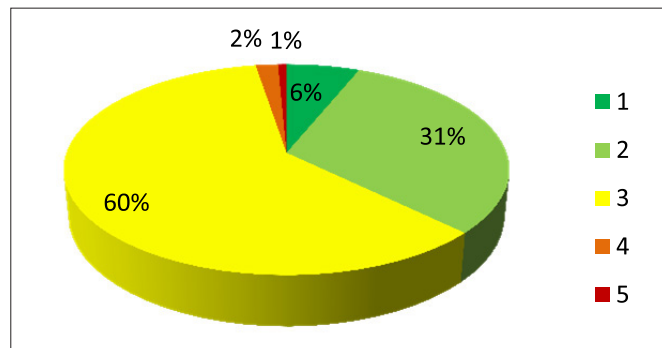
Tabel 13. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Kota Bandar Lampung	6	9	78	3	2	98
2	Kota Metro	3	10	9			22
3	Lampung Barat	13	86	123	6	26	254
4	Lampung Selatan	14	61	173		3	251
5	Lampung Tengah	26	66	212		3	307
6	Lampung Timur	14	78	163		2	257
7	Lampung Utara	17	73	150	2	5	247
8	Mesuji	1	8	65		2	76
9	Pesawaran	4	32	90		7	133
10	Pringsewu	4	36	60		1	101
11	Tanggamus	3	123	113		39	278
12	Tulang Bawang Barat	5	9	64	1		79
13	Tulangbawang	10	21	110	2	8	151
14	Way Kanan	13	79	110		8	210
	Jumlah	133	691	1520	14	106	2464

11. Provinsi Banten

Provinsi Banten terletak di posisi geografis (5°LS-8°LS dan 105°-107°BT). Luas wilayah seluas 8.800,83 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 10.644.030 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Kopi, Teh, tembakau, Nilam

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Banten termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Banten.



Gambar 15. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Banten

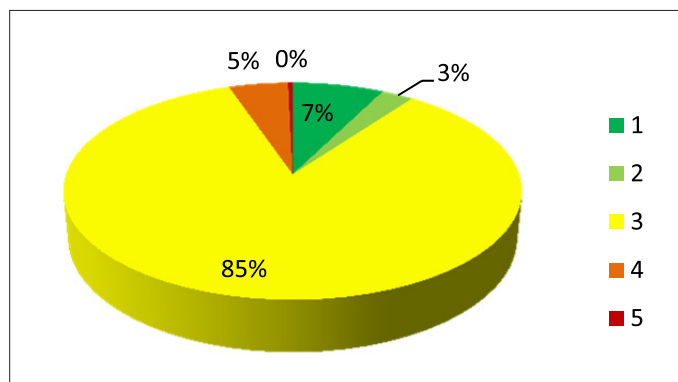
Tabel 14. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Banten

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Kota Cilegon	5	14	24			43
2	Kota Serang	4	5	57			66
3	Kota Tangerang	23		61	20		104
4	Kota Tangerang Selatan	2		49	3		54
5	Lebak	29	136	178		2	345
6	Pandeglang	15	211	103		6	335
7	Serang	8	77	225	2	2	314
8	Tangerang	9	33	227	4	1	274
	Jumlah	95	476	924	29	11	1535

12. Provinsi DKI

Provinsi Lampung terletak di posisi geografis(6°LS-7°LS dan 106°-107°BT). Luas wilayah seluas 154,00 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 10.187.595 jiwa. DKI merupakan kota industri utama yaitu TSP, Tekstil, Pemintalan Benang, Mobil dan Perakitan, Kayu Lapis, Farmasi, Susu, Percetakan, Logam.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi DKI termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Banten.



Gambar 16. Persentase Kerentanan Desa Provinsi DKI

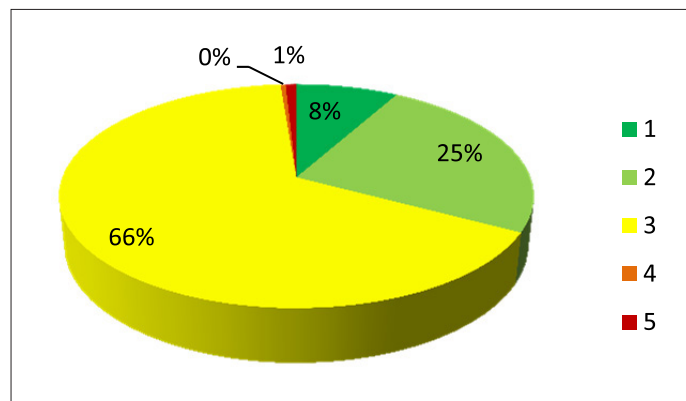
Tabel 15. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi DKI

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Kepulauan Seribu		6				6
2	Kota Jakarta Barat	4		47	5		56
3	Kota Jakarta Pusat	7		36	1		44
4	Kota Jakarta Selatan	8		56	1		65
5	Kota Jakarta Timur	1	1	60	3		65
6	Kota Jakarta Utara			27	3	1	31
	Jumlah	20	7	226	13	1	267

13. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak di posisi geografis (5°LS-8°LS dan 106°-109°BT). Luas wilayah seluas 3.266.559 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 43.053.732 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. DKI merupakan kota industri utama yaitu Tekstil, Pabrik Teh, Susu, Sutra Alam, Baterai, Kertas Pupuk, Semen, Senjata, Alat Telekomunikasi, Pesawat Terbang ,Batik, dan Tenun.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Jawa Barat termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Jawa Barat.



Gambar 17. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Barat

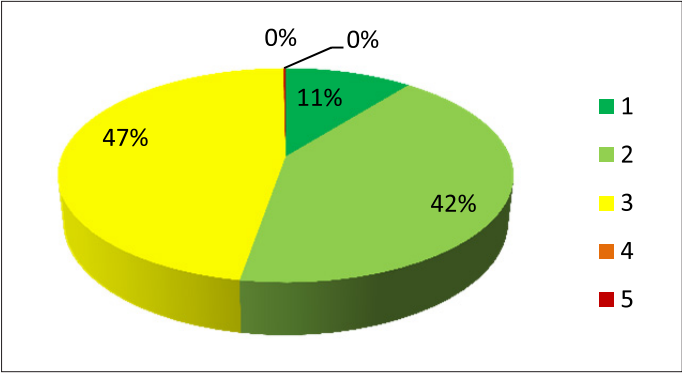
Tabel 16. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bandung	41	31	201	2	1	276
2	Bandung Barat	15	67	83			165
3	Bekasi	11	31	137	3	5	187
4	Bogor	26	49	347		6	428
5	Ciamis	47	131	174		1	353
6	Cianjur	7	64	276	2	11	360
7	Cirebon	23	25	366	1	9	424
8	Garut	12	228	186		5	431
9	Indramayu	28	53	232		3	316
10	Karawang	23	20	265	1		309
11	Kota Bandung	20	14	113	3	1	151
12	Kota Banjar	1	11	13			25
13	Kota Bekasi	2		47	7		56
14	Kota Bogor	26	5	37			68
15	Kota Cimahi			15			15
16	Kota Cirebon	4	5	13			22
17	Kota Depok	4		54	5		63
18	Kota Sukabumi	12	11	10			33
19	Kota Tasikmalaya	3	25	41			69
20	Kuningan	30	110	233		3	376
21	Majalengka	28	59	249			336
22	Purwakarta	9	70	112		1	192
23	Subang	13	86	153		1	253
24	Sukabumi	15	153	195		4	367
25	Sumedang	56	85	138			279
26	Tasikmalaya	27	118	206			351
	Jumlah	483	1451	3896	24	51	5905

14. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di posisi geografis (6°LS-9°LS dan 108°-112°BT). Luas wilayah seluas 34.966.000 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 43.053.732 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Kopi, Teh, tembakau, Nilam.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Jawa Tengah.



Gambar 18. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Tengah

Tabel 17. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Tengah

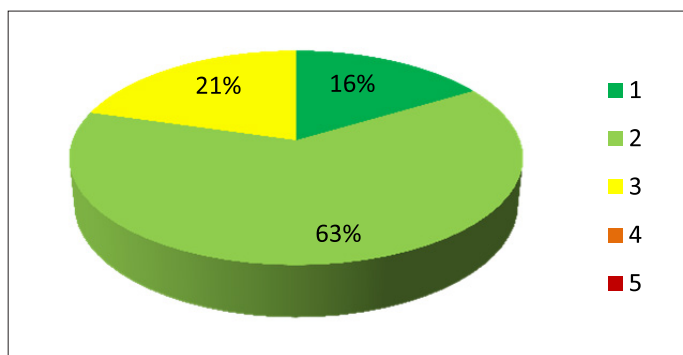
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Banjarnegara	13	171	94			278
2	Banyumas	19	122	186		4	331
3	Batang	16	136	96			248
4	Blora	30	136	128		1	295
5	Boyolali	18	183	66			267
6	Brebes	5	63	227		2	297
7	Cilacap	18	68	198			284
8	Demak	29	64	156			249
9	Grobogan	19	52	209			280
10	Jepara	6	51	137			194
11	Karanganyar	26	60	91			177
12	Kebumen	32	239	188		1	460
13	Kendal	33	130	123			286
14	Klaten	47	214	139		1	401
15	Kota Magelang	14	2	1			17
16	Kota Pekalongan	4	23	20			47
17	Kota Salatiga	13	5	4			22
18	Kota Semarang	61	23	93			177
19	Kota Surakarta	7	22	22			51
20	Kota Tegal	1	3	23			27

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
21	Kudus	15	26	91			132
22	Magelang	36	221	115			372
23	Pati	47	121	236	2		406
24	Pekalongan	20	140	125			285
25	Pemalang	13	10	194	1	4	222
26	Purbalingga	40	61	138			239
27	Purworejo	82	291	121			494
28	Rembang	20	219	55			294
29	Semarang	30	125	80			235
30	Sragen	31	117	60			208
31	Sukoharjo	24	66	77			167
32	Tegal	22	15	249		1	287
33	Temanggung	46	138	105			289
34	Wonogiri	53	150	91			294
35	Wonosobo	28	136	100		1	265
	Jumlah	918	3603	4038	3	15	8577

15. Provinsi DI. Yogyakarta

Provinsi DIY terletak di posisi geografis (7°LS-9°LS dan 110°-111°BT). Luas wilayah seluas 3.142 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 3.452.390 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Kelapa.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi DIY termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi DIY.



Gambar 19. Persentase Kerentanan Desa Provinsi DIY

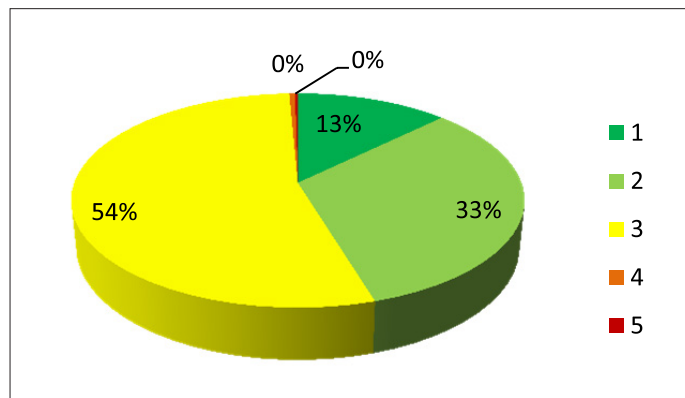
Tabel 18. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi DIY

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bantul	1	48	26			75
2	Gunung Kidul	27	99	18			144
3	Kota Yogyakarta	29	7	9			45
4	Kulon Progo	5	77	6			88
5	Sleman	10	45	31			86
	Jumlah	72	276	90			438

16. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak di posisi geografis (6°LS-9°LS dan 110°-115°BT). Luas wilayah seluas 47.921,98 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 37.476.757 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Teh, Tembakau, Vanili, Tebu, Jambu Mete, Kelapa, karet, Cengkeh, kakao.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Jawa Timur termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Jawa Timur.



Gambar 20. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Jawa Timur

Tabel 19. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Jawa Timur

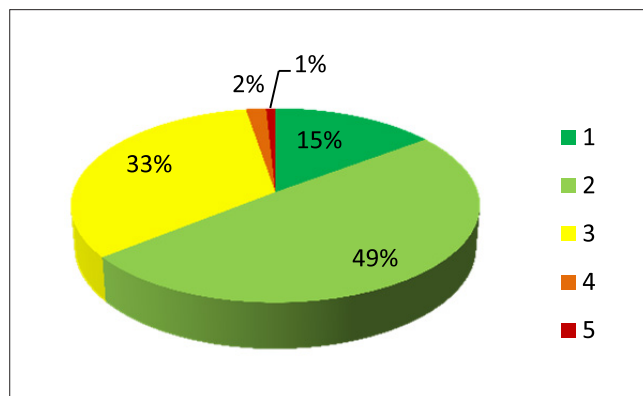
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bangkalan	56	58	162	1	4	281
2	Banyuwangi	31	46	140			217
3	Blitar	16	83	149			248
4	Bojonegoro	56	128	244		2	430
5	Bondowoso	24	103	91		1	219
6	Gresik	59	156	137	3	1	356
7	Jember	3	32	208		5	248
8	Jombang	29	105	172			306
9	Kediri	7	74	261		2	344
10	Kota Batu	3		21			24
11	Kota Blitar	11	3	7			21
12	Kota Kediri	13	11	22			46
13	Kota Madiun	20	1	6			27
14	Kota Malang	15	4	33	5		57
15	Kota Mojokerto	7	4	7			18
16	Kota Pasuruan	13	5	16			34
17	Kota Probolinggo	7	4	18			29
18	Kota Surabaya	39	3	91	26	1	160
19	Lamongan	110	269	95			474
20	Lumajang	47	25	133			205
21	Madiun	15	57	133	1		206
22	Magetan	57	95	83			235
23	Malang	25	75	289	1		390
24	Mojokerto	37	77	190			304
25	Nganjuk	65	45	174			284
26	Ngawi	15	75	126		1	217
27	Pacitan	11	97	63			171
28	Pamekasan	26	92	71			189
29	Pasuruan	43	115	207			365
30	Ponorogo	23	176	106			305
31	Probolinggo	35	159	136			330
32	Sampang	19	72	94		1	186
33	Sidoarjo	18	45	284	4	1	352

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
34	Situbondo	24	43	69			136
35	Sumenep	47	171	114			332
36	Trenggalek	7	73	76		1	157
37	Tuban	28	99	201			328
38	Tulungagung	23	88	160			271
	Jumlah	1084	2768	4589	41	20	8502

17. Provinsi Bali

Provinsi Bali terletak di posisi geografis (8°LS-9°LS dan 114°-116°BT). Luas wilayah seluas 563.286 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 3.891.428 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah kelapa, kopi, jambu mete. Bali merupakan kota pariwisata.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Bali termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Bali.



Gambar 21. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Bali

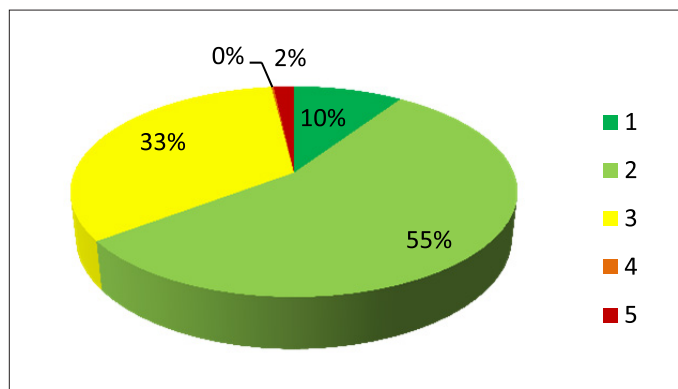
Tabel 20. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Badung	12	25	20	5		62
2	Bangli	1	38	31		2	72
3	Buleleng	11	78	57		2	148
4	Gianyar	4	17	49			70
5	Jembrana	7	25	19			51
6	Karang Asem	4	63	9		2	78
7	Klungkung	15	30	14			59
8	Kota Denpasar	11	3	21	8		43
9	Tabanan	41	75	17			133
	Jumlah	106	354	237	13	6	716

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB terletak di posisi geografis (8°LS-10°LS dan 115°-120°BT). Luas wilayah seluas 20.153,15 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.500.212 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Kopi. NTB merupakan kota pariwisata.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi NTB termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi NTB.



Gambar 22. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat

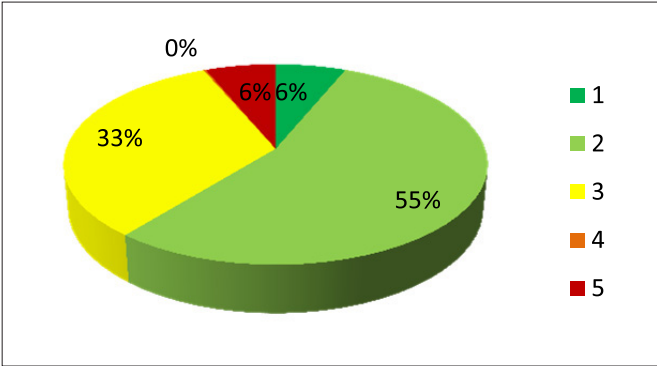
Tabel 21. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bima	19	106	50		2	177
2	Dompu	11	49	19			79
3	Kota Bima	2	17	19			38
4	Kota Mataram	22		27	1		50
5	Lombok Barat	6	40	75		2	123
6	Lombok Tengah	21	89	29			139
7	Lombok Timur	6	104	92	1	12	215
8	Lombok Utara		22	11			33
9	Sumbawa	8	120	36		2	166
10	Sumbawa Barat	7	53	3		1	64
	Jumlah	102	600	361	2	19	1084

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi NTT terletak di posisi geografis (8°LS-11°LS dan 118°-126°BT). Luas wilayah seluas 47.349,9 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.683.827 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama adalah Cengkeh, Kakao.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi NTT termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi NTT.



Gambar 23. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

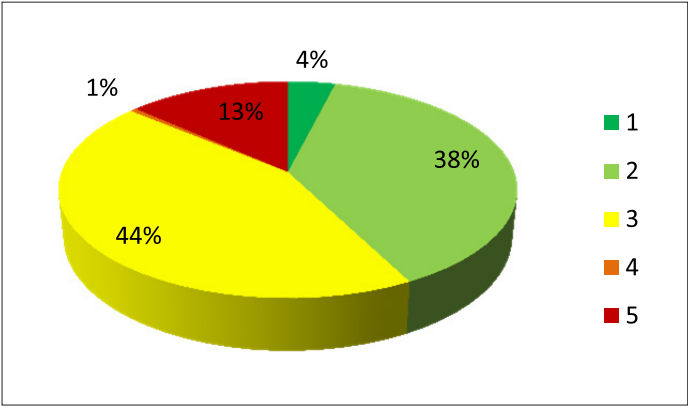
Tabel 22. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Alor	7	114	51		3	175
2	Belu	4	110	82		12	208
3	Ende	13	172	22		7	214
4	Flores Timur	28	190	30		2	250
5	Kota Kupang	11	9	30	1		51
6	Kupang	20	95	60		2	177
7	Lembata	38	91	14		1	144
8	Manggarai		41	97		11	149
9	Manggarai Barat	3	36	71	1	10	121
10	Manggarai Timur	2	53	101		20	176
11	Nagekeo	5	79	9		7	100
12	Ngada	12	74	17			103
13	Rote Ndao	3	61	23	1		88
14	Sabu Raijua	2	17	40		4	63
15	Sikka	4	131	24		1	160
16	Sumba Barat	1	16	34		9	60
17	Sumba Barat Daya		13	12	2	69	96
18	Sumba Tengah	1	29	12		1	43
19	Sumba Timur	8	96	48	1	3	156
20	Timor Tengah Selatan	9	86	127		18	240
21	Timor Tengah Utara	14	107	66		5	192
	Jumlah	185	1620	970	6	185	2966

20. Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terletak di posisi geografis (2°LU-3°LS dan 108°-114°BT). Luas wilayah seluas 146.807 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.395.983 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama karet, kelapa sawit, rotan, kelapa, lidah buaya dan lain-lain. Produk pertambangan utama adalah : Bauksit, Intan.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 24. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Barat

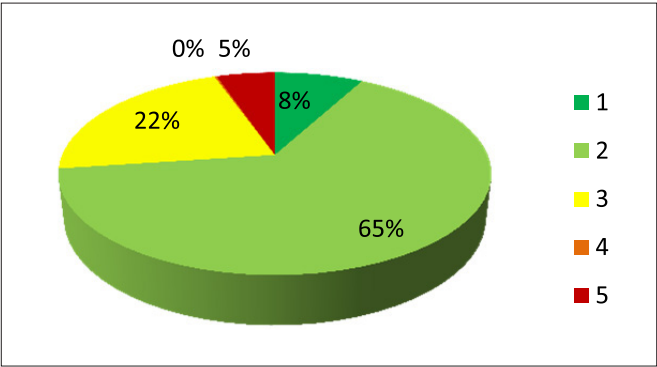
Tabel 23. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bengkayang	9	35	67	1	12	124
2	Kapuas Hulu	25	156	79	1	21	282
3	Kayong Utara		23	11		9	43
4	Ketapang	17	108	99	1	24	249
5	Kota Pontianak	3	1	25			29
6	Kota Singkawang	4	2	20			26
7	Kubu Raya		52	52		5	109
8	Landak	1	71	49		35	156
9	Melawi	2	48	73	1	45	169
10	Pontianak		45	18		4	67
11	Sambas	7	83	84		10	184
12	Sanggau	3	60	93		10	166
13	Sekadau	1	19	36		20	76
14	Sintang	5	54	153	6	69	287
	Jumlah	77	757	859	10	264	1967

21. Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di posisi geografis (1^oLU-4^oLS dan 110^o-116^oBT). Luas wilayah seluas 153.800 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.202.599 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama Kelapa Sawit, Rotan, Karet. Produk pertambangan utama adalah: Minyak Bumi, Intan, batubara.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 25. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 24. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Tengah

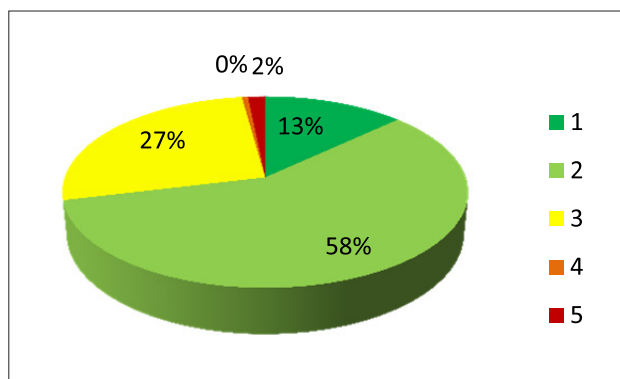
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Barito Selatan	11	65	18		1	95
2	Barito Timur	23	68	12			103
3	Barito Utara	9	77	14		3	103
4	Gunung Mas		83	27		15	125
5	Kapuas	7	137	43		17	204
6	Katingan	11	123	25		2	161
7	Kota Palangka Raya	1	21	7		1	30
8	Kotawaringin Barat	17	41	35	1		94
9	Kotawaringin Timur	8	85	70	2	10	175

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
10	Lamandau	11	54	18			83
11	Murung Raya	6	88	24		6	124
12	Pulang Pisau	10	77	12			99
13	Seruyan	4	51	20		25	100
14	Sukamara	3	22	7			32
	Jumlah	121	992	332	3	80	1528

22. Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di posisi geografis (1°LS-5°LS dan 114°-117°BT). Luas wilayah seluas 37.377,53 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 3.626.616 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama Kelapa Sawit, Karet, Kopi t. Produk pertambangan utama adalah Batubara, Intan, Bijih Besi.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kalimantan Selatan termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 26. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

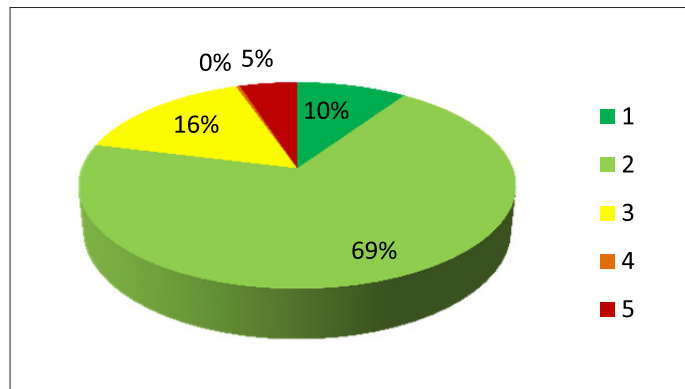
Tabel 25. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Balangan	28	111	13			152
2	Banjar	24	166	87	3	10	290
3	Barito Kuala	20	149	26	1	4	200
4	Hulu Sungai Selatan	17	110	18		3	148
5	Hulu Sungai Tengah	31	95	43			169
6	Hulu Sungai Utara	6	182	28		3	219
7	Kota Banjar Baru	7	2	11			20
8	Kota Banjarmasin	7	3	40	2		52
9	Kota Baru	27	86	81		7	201
10	Tabalong	32	80	16	3		131
11	Tanah Bumbu	21	48	78	2	1	150
12	Tanah Laut	17	65	53			135
13	Tapin	24	66	39		4	133
	Jumlah	261	1163	533	11	32	2000

23. Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur terletak di posisi geografis (1°LU-3°LS dan 113°-120°BT). Luas wilayah seluas 211.440 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 3,553,143 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama Kelapa sawit, Karet Produk pertambangan utama adalah Batubara, Gas Alam Cair, Minyak Bumi.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 27. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Timur

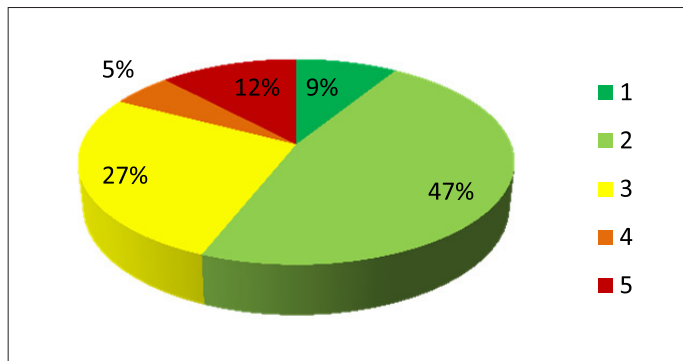
Tabel 26. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Berau	8	87	14		3	112
2	Kota Balikpapan	25	2				27
3	Kota Bontang	3	2	10			15
4	Penajam Paser Utara	5	45	4			54
5	Kutai Barat	2	215	9		12	238
6	Kutai Kartanegara	23	155	32		17	227
7	Kutai Timur	13	70	40	1	11	135
8	Paser	1	114	12		4	131
9	Kota Samarinda	12	7	32	2		53
	Jumlah	84	610	139	3	44	880

24. Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terletak di posisi geografis (0°57' LU 116°26' BT). Luas wilayah seluas 77.382,78 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 738.163 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi perkebunan utama Kelapa sawit, Karet. Produk pertambangan utama adalah Batubara, dan Minyak Bumi.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 28. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Kalimantan Utara

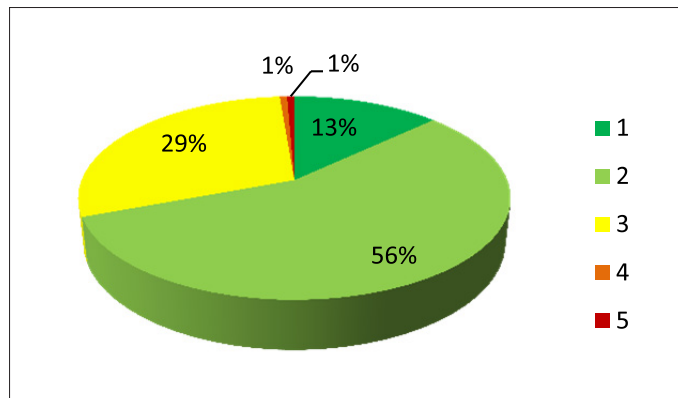
Tabel 27. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Kota Tarakan	4	2	13		1	20
2	Bulungan	3	72	5		1	81
3	Malinau	18	62	20	2	7	109
4	Nunukan	16	65	88	23	48	240
5	Tana Tidung	1	22				23
	Jumlah	42	223	126	25	57	473

25. Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara terletak di posisi geografis (0°LU-6°LU dan 120°-128°BT). Luas wilayah seluas 25.768 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.270.596 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Agave, kelapa, kakao, cengkeh, lada, jambu mete, kopi. Produk pertambangan utama adalah Emas, Marmer, Mangan.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sulawesi Utara termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 29. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Utara

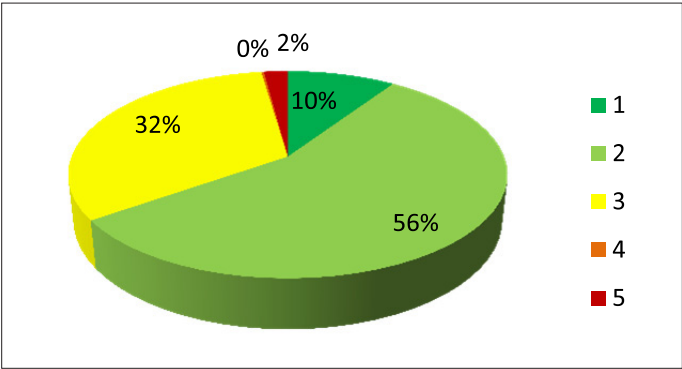
Tabel 28 . Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bolaang Mongondow	15	61	93	3		172
2	Bolaang Mongondow Selatan	2	53	9		1	65
3	Bolaang Mongondow Timur	7	22	21		1	51
4	Bolaang Mongondow Utara	3	78	10		1	92
5	Kepulauan Sangihe	43	102	21		1	167
6	Kepulauan Talaud	26	108	19			153
7	Kota Bitung	10	18	38	3		69
8	Kota Kotamobagu	10	1	21	1		33
9	Kota Manado	32	12	42	1		87
10	Kota Tomohon	8	16	20			44
11	Minahasa	22	128	85	1	1	237
12	Minahasa Selatan	22	99	48		1	170
13	Minahasa Tenggara	4	106	30		4	144
14	Minahasa Utara	8	83	31	2	1	125
15	Siau Tagulandang Biaro	9	65	10			84
	Jumlah	221	952	498	11	11	1693

26. Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di posisi geografis (2°LU-4°LS dan 119°-125°BT). Luas wilayah seluas 68.033 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.635.009 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Kopi, kelapa, kakao dan cengkeh. Produk pertambangan utama adalah Emas, Bijih Besi, Nikel, Mika.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 30. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

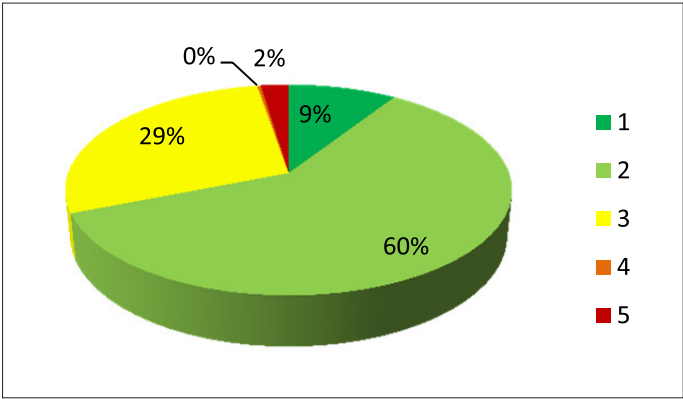
Tabel 29. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Banggai	36	186	112	2	3	339
2	Banggai Kepulauan	48	95	64		3	210
3	Buol	3	68	33		4	108
4	Donggala	8	79	55		8	150
5	Kota Palu	5	6	32			43
6	Morowali	17	165	55		3	240
7	Parigi Moutong	19	50	121	2	8	200
8	Poso	17	112	23		4	156
9	Sigi	6	102	45		4	157
10	Tojo Una-Una	11	76	33		1	121
11	Toli-Toli	1	75	15			91
	Jumlah	171	1014	588	4	38	1815

27. Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di posisi geografis (0°LS-8°LS dan 118°-122°BT). Luas wilayah seluas 62.482,54 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.635.009 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi kakao. Produk pertambangan utama adalah Nikel.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 31. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 30. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Selatan

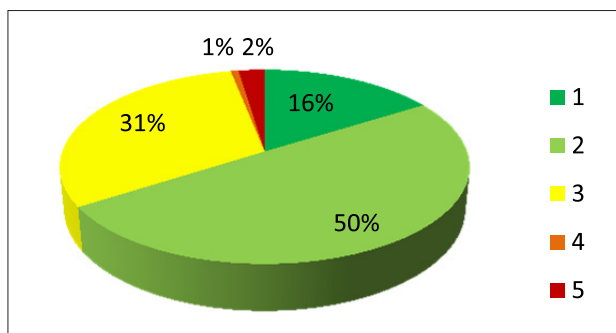
No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bantaeng	3	53	10		1	67
2	Barru	1	45	8			54
3	Bone	21	251	92		8	372
4	Bulukumba	17	80	26		3	126
5	Enrekang	12	109	8			129
6	Gowa	6	80	80		1	167
7	Jeneponto	14	79	20			113
8	Kota Makassar	53	6	78	6		143
9	Kota Palopo	5	30	13			48
10	Kota Pare-Pare	7	3	12			22

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
11	Luwu	12	130	56		29	227
12	Luwu Timur	12	52	46	1	1	112
13	Luwu Utara	16	98	58	1	3	176
14	Maros	7	65	27	1	3	103
15	Pangkajene Dan Kepulauan	3	47	50		3	103
16	Pinrang	13	28	63			104
17	Selayar	18	53	10			81
18	Sidenreng Rappang	10	64	32			106
19	Sinjai	5	60	15			80
20	Soppeng	9	56	5			70
21	Takalar	13	64	16			93
22	Tana Toraja	5	114	36		4	159
23	Toraja Utara	5	82	50		14	151
24	Wajo	6	135	35			176
	Jumlah	273	1784	846	9	70	2982

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di posisi geografis (2°LS-7°LS dan 120°-125°BT). Luas wilayah seluas 38.140 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.635.009 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi kelapa. Produk pertambangan utama adalah Nikel.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 32. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara

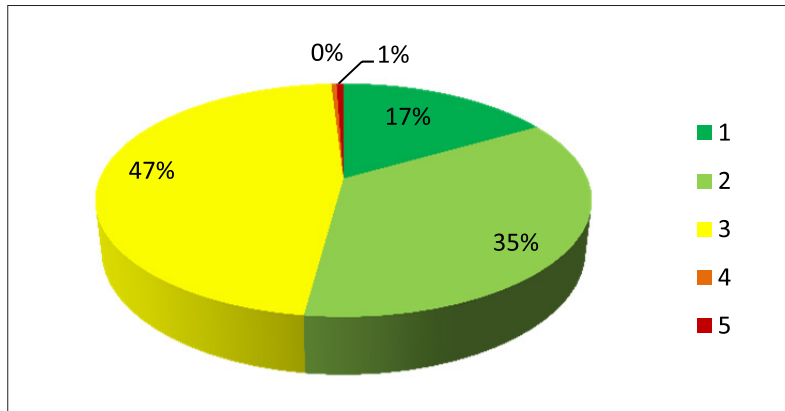
Tabel 31. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Bombana	13	56	63	1	6	139
2	Buton	55	106	46			207
3	Buton Utara	15	21	23			59
4	Kolaka	17	123	71	1	3	215
5	Kolaka Utara	3	89	25		16	133
6	Konawe	75	180	133	9	14	411
7	Konawe Selatan	71	163	122	3	6	365
8	Konawe Utara	27	91	25		3	146
9	Kota Bau-Bau	12	16	15			43
10	Kota Kendari	7	19	38			64
11	Muna	17	153	66	1	2	239
12	Wakatobi	30	40	29		1	100
	Jumlah	342	1057	656	15	51	2121

29. Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo terletak di posisi geografis (0°LU-1°LU dan 120°-124°BT). Luas wilayah seluas 10.804 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.040.164 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah, jagung, bawang merah, daun bawang, bayam, buncis, kangkung, ketimun, cabai, sawi, terong, kacang panjang, kubis, labu siam, dan tomat, durian, mangga, nangka, anas, pepaya, pisang, dan rambutan, Kelapa sawit. Produk pertambangan utama adalah Emas dan Tembaga.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Gorontalo termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Gorontalo.



Gambar 33. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Gorontalo

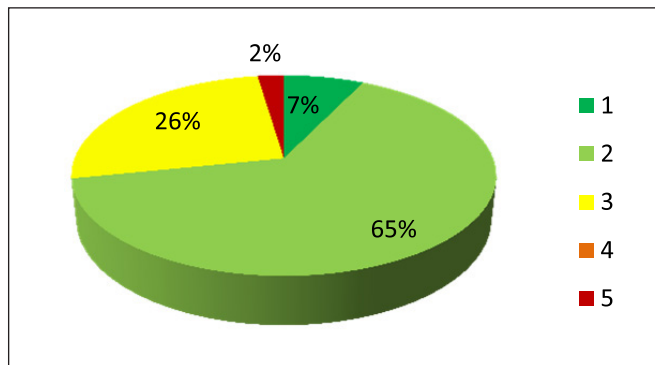
Tabel 32. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Boalemo	5	32	47			84
2	Bone Bolango	15	88	60		2	165
3	Gorontalo	42	48	115			205
4	Gorontalo Utara	25	41	53	3	1	123
5	Kota Gorontalo	14	6	30			50
6	Pohuwato	21	44	38		1	104
	Jumlah	122	259	343	3	4	731

30. Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat terletak di posisi geografis (0°LS-3°LS dan 118°-120°BT). Luas wilayah seluas 16.796,19 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.158.336 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Kakao, Cengkeh, Kelapa sawit, Kelapa dalam, kopi robusta, Rotan. Produk pertambangan utama adalah Bijih Besi, Nikel, Tembaga, Timah Hitam.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Sulawesi Barat termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 34. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Sulawesi Barat

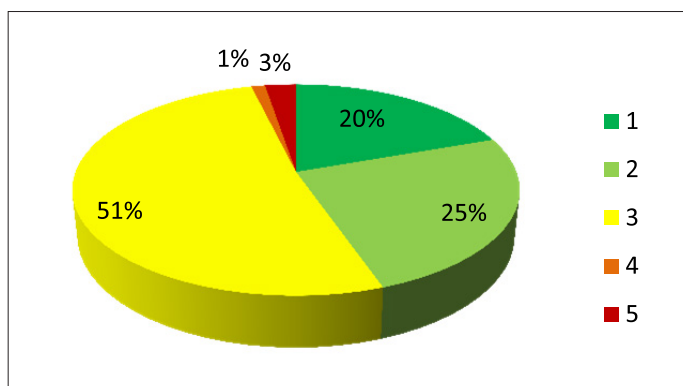
Tabel 33. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Majene	7	62	7			76
2	Mamasa	21	114	40		2	177
3	Mamuju	9	90	50		6	155
4	Mamuju Utara	6	36	20		1	63
5	Polewali Mandar	3	110	48		6	167
	Jumlah	46	412	165		15	638

31. Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terletak di posisi geografis (0°LS-9°LS dan 124°-136°BT). Luas wilayah seluas 851.000 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1,533,506 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Pala, Cengkeh, Kelapa. Produk pertambangan utama adalah Emas, Minyak Bumi.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Maluku termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Maluku.



Gambar 35. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Maluku

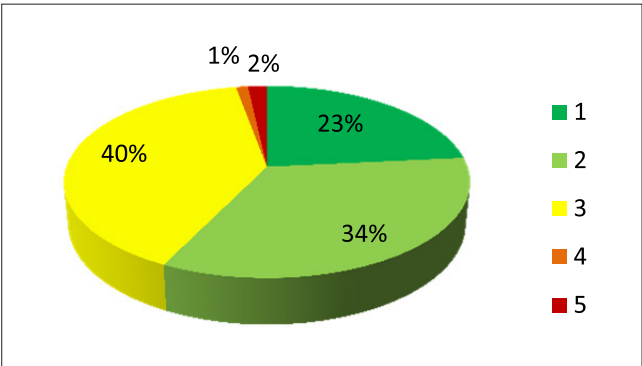
Tabel 34. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Maluku

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Buru	14	24	42	1	1	82
2	Buru Selatan	4	9	36		6	55
3	Kepulauan Aru	31	8	79		1	119
4	Kota Ambon	7	20	22	1		50
5	Kota Tual	13	2	14			29
6	Maluku Barat Daya	28	18	70		1	117
7	Maluku Tengah	35	64	75		2	176
8	Maluku Tenggara	28	39	20			87
9	Maluku Tenggara Barat	4	23	33		14	74
10	Seram Bagian Barat	13	44	34	1		92
11	Seram Bagian Timur	24	5	103	9	2	143
Jumlah		201	256	528	12	27	1024

32. Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara terletak di posisi geografis (3°LU-°3LS dan 124°-129°BT). Luas wilayah seluas 33.321,22 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Pisang, Kopra, Cengkeh, Pala. Produk pertambangan utama adalah Minyak Bumi, Nikel.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Maluku Utara termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Maluku Utara.



Gambar 36. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Maluku Utara

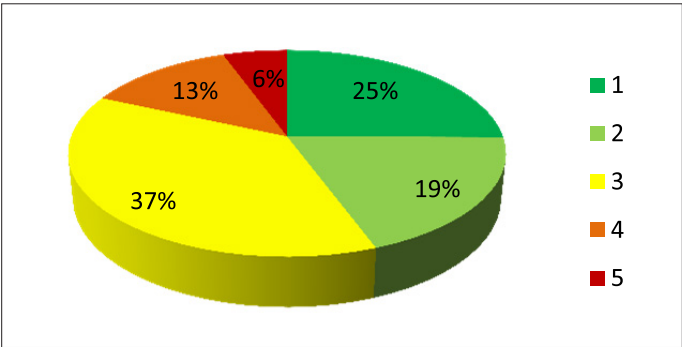
Tabel 35. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Halmahera Barat	37	87	21		2	147
2	Halmahera Selatan	46	66	133	3	8	256
3	Halmahera Tengah	18	26	12			56
4	Halmahera Timur	16	29	30		2	77
5	Halmahera Utara	42	80	68	2	5	197
6	Kepulauan Sula	38	7	81	6	1	133
7	Kota Ternate	20	18	38	1		77
8	Kota Tidore Kepulauan	25	29	18			72
9	Pulau Morotai	11	23	29		1	64
	Jumlah	253	365	430	12	19	1079

33. Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat terletak di posisi geografis (0°LS-5°LS dan 130°-138°BT). Luas wilayah seluas 116.571 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 760.422 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Kakao, kelapa sawit, karet, kopi. Produk pertambangan utama adalah Minyak Bumi, Emas, Perak,.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Papua Barat termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Papua Barat.



Gambar 37. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Papua Barat

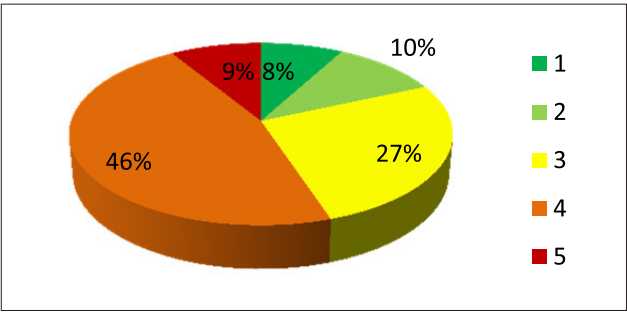
Tabel 36. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	FAKFAK	54	42	26	1	1	124
2	KAIMANA	42	12	31	1		86
3	KOTA SORONG	1	3	23	2	2	31
4	MANOKWARI	60	43	172	128	14	417
5	MAYBRAT	13	27	62	12	15	129
6	RAJA AMPAT	71	12	29	8		120
7	SORONG	23	49	45	7	11	135
8	SORONG SELATAN	29	36	33	2	19	119
9	TAMBRAUW	8	6	24	6	6	50
10	TELUK BINTUNI	39	25	67	12	9	152
11	TELUK WONDAMA	21	22	25	5	3	76

34. Provinsi Papua

Provinsi Papua terletak di posisi geografis (1°LS-6°LS dan 131°-141°BT). Luas wilayah seluas 421.981 km² dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 2.831.381 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya komoditi Cengkeh, Karet, Kelapa, kakao. Produk pertambangan utama adalah Minyak Bumi, Emas, Tembaga.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Papua termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Papua.



Gambar 38. Persentase Kerentanan Desa Provinsi Papua

Tabel 37. Jumlah Desa yang Rentan Di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
1	Asmat		3	34	38	64	139
2	Biak Numfor	53	101	31	1	1	187
3	Boven Digoel	32	21	44	12	1	110
4	Deiyai			1	24	5	30
5	Dogiyai			15	61	3	79
6	Intan Jaya			7	29	1	37
7	Jayapura	29	80	26	5	4	144
8	Jayawijaya	5	10	101	117	51	284
9	Keerom	15	33	10	2	1	61
10	Kepulauan Yapen	5	44	52	2	8	111
11	Kota Jayapura	10	5	21	3		39
12	Lanny Jaya		1	47	85	10	143
13	Mamberamo Raya	3	8	15	7	6	39
14	Mamberamo Tengah		2	40	16	1	59
15	Mappi	7		66	51	13	137
16	Merauke	52	33	80	1	2	168
17	Mimika	12	5	50	16	2	85
18	Nabire	26	13	32	8	2	81

No	Kabupaten	Tingkat Kerentanan					Tota Desa
		1	2	3	4	5	
19	Nduga			2	18	12	32
20	Paniai			5	58	7	70
21	Pegunungan Bintang	1	1	51	183	8	244
22	Puncak			5	65	10	80
23	Puncak Jaya	1	6	31	233	31	302
24	Sarmi	21	12	33	9	11	86
25	Supiori	17	6	12		3	38
26	Tolikara	2	3	100	363	39	507
27	Waropen	22	18	21	25	1	87
28	Yahukimo		3	101	371	43	518
29	Yalimo			6	15	6	27
	Jumlah	313	408	1039	1818	346	3924

PENUTUP

Berdasarkan data SIDIK maka jumlah desa yang rentan dan sangat rentan (Sumber data Podes 2011) maka diperoleh bahwa dari total desa di Indonesia yang masuk kategori Sangat Rentan sejumlah 2.507 (3%), dan kategori Rentan sejumlah 2.433 (3%). Desa yang masuk kategori cukup rentan sejumlah 31.875 (41%). Jumlah Total yang masuk kategori rentan dan sangat rentan tidak terlalu besar yaitu 6 %, tetapi yang masuk kategori cukup rentan sangat besar yaitu 41%.

Berdasarkan data tersebut maka diperlukan perencanaan dan aksi implementasi yang nyata untuk menurunkan tingkat kerentanan yang masuk pada kategori cukup rentan karena kategori cukup rentan jumlahnya sangat besar dan berpeluang untuk menjadi rentan karena tidak ada dukungan program untuk menurunkan kerentanan.

Program untuk peningkatan kapasitas adaptasi melalui peningkatan infrastruktur, maupun kapasitas kelembagaan, pendidikan sangat perlu dilakukan agar kerentanan menjadi menurun. Penurunan tingkat sensitivitas yaitu diantaranya program peningkatan sumber penghasilan, kondisi tempat tinggal, penurunan tingkat kemiskinan menjadi sangat penting dalam program pemerintah.

Data kerentanan nasional ini sangat penting dan strategis bagi perumusan kebijakan dan perencanaan secara nasional, sektor terkait dan juga pemerintah daerah. Perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan data kerentanan akan bermanfaat tidak hanya untuk pembangunan berkelanjutan tetapi juga ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

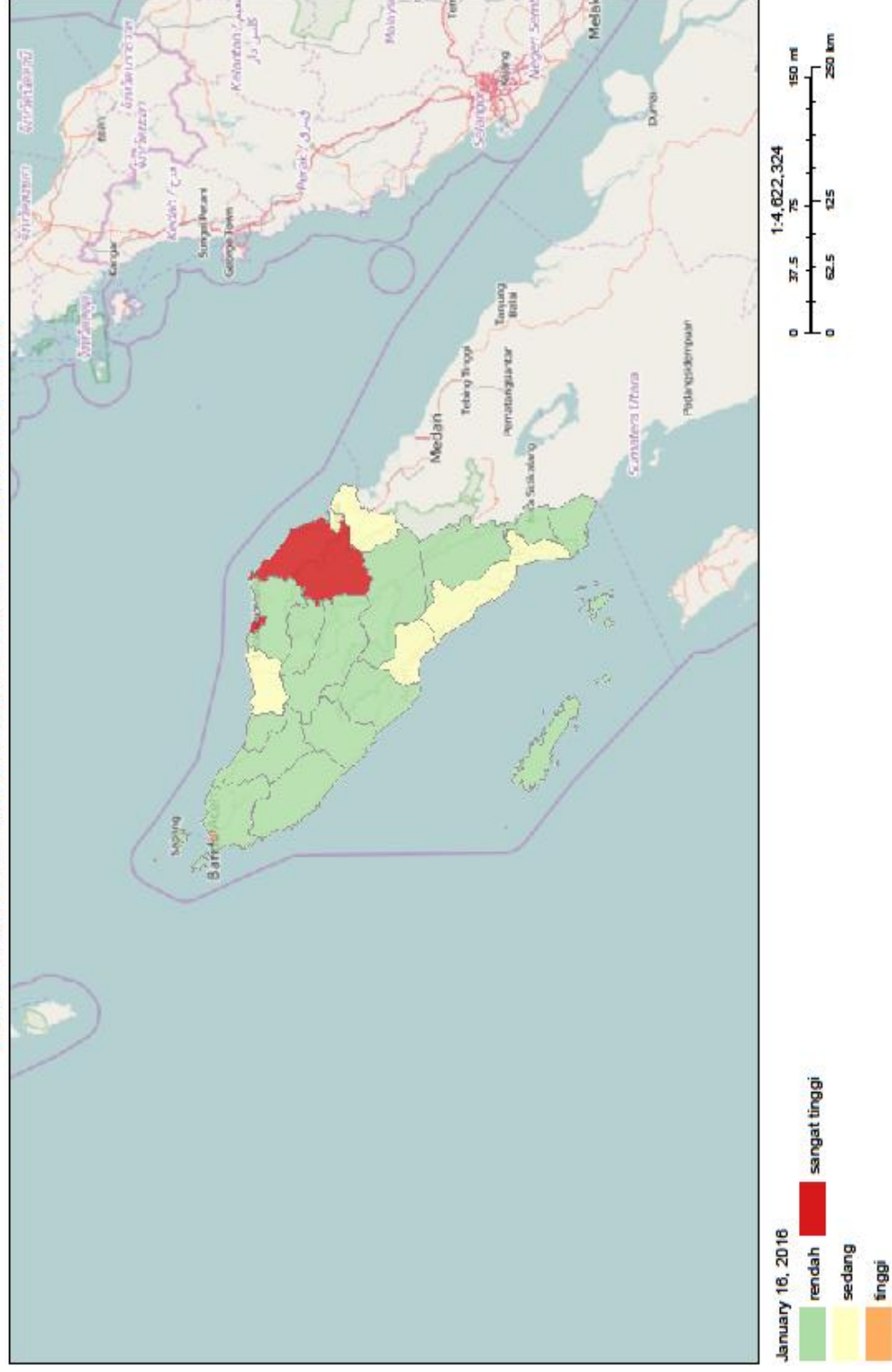
Lampiran

Peta Kerentanan Perubahan Iklim

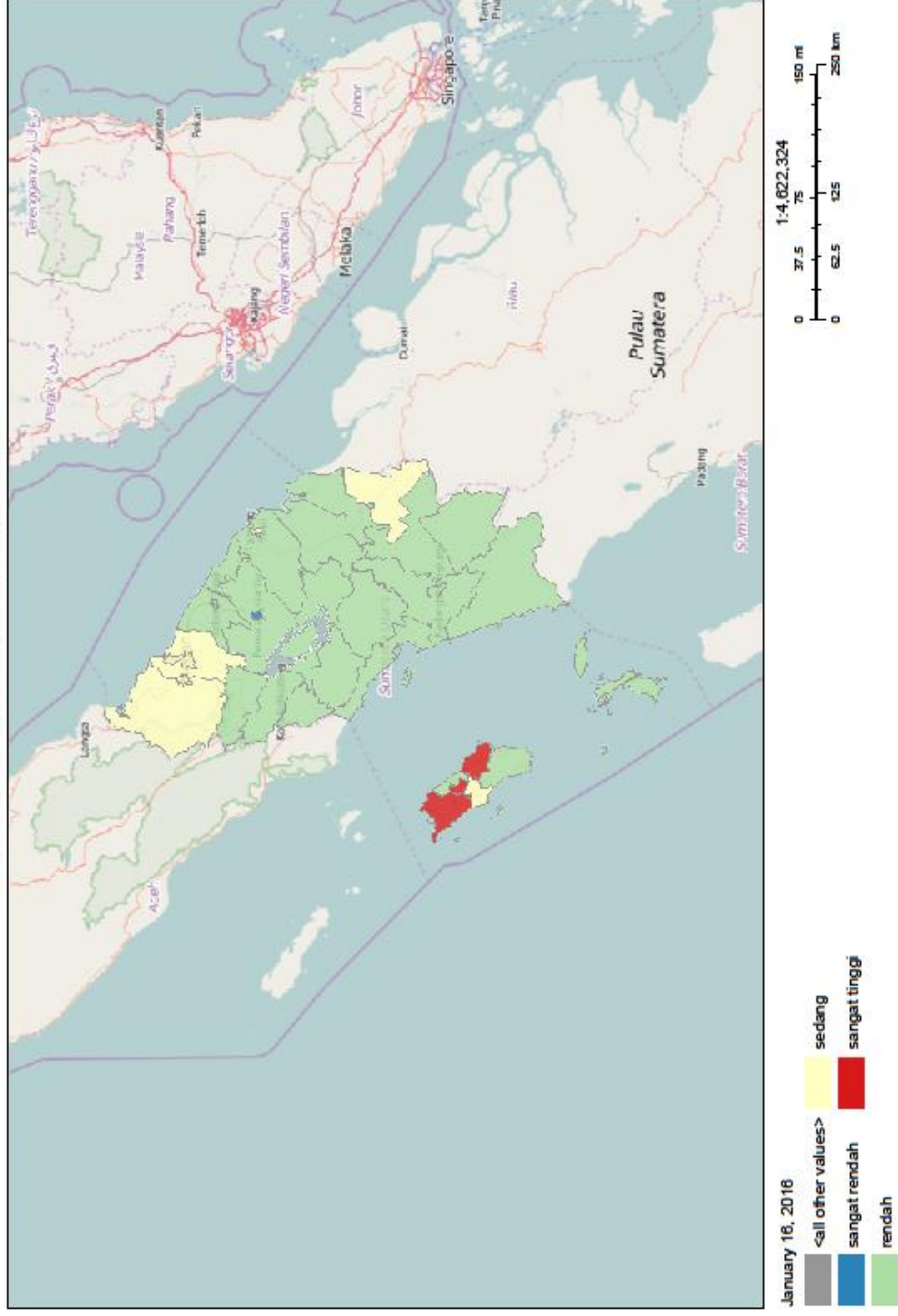
Seluruh Indonesia

PULAU SUMATERA

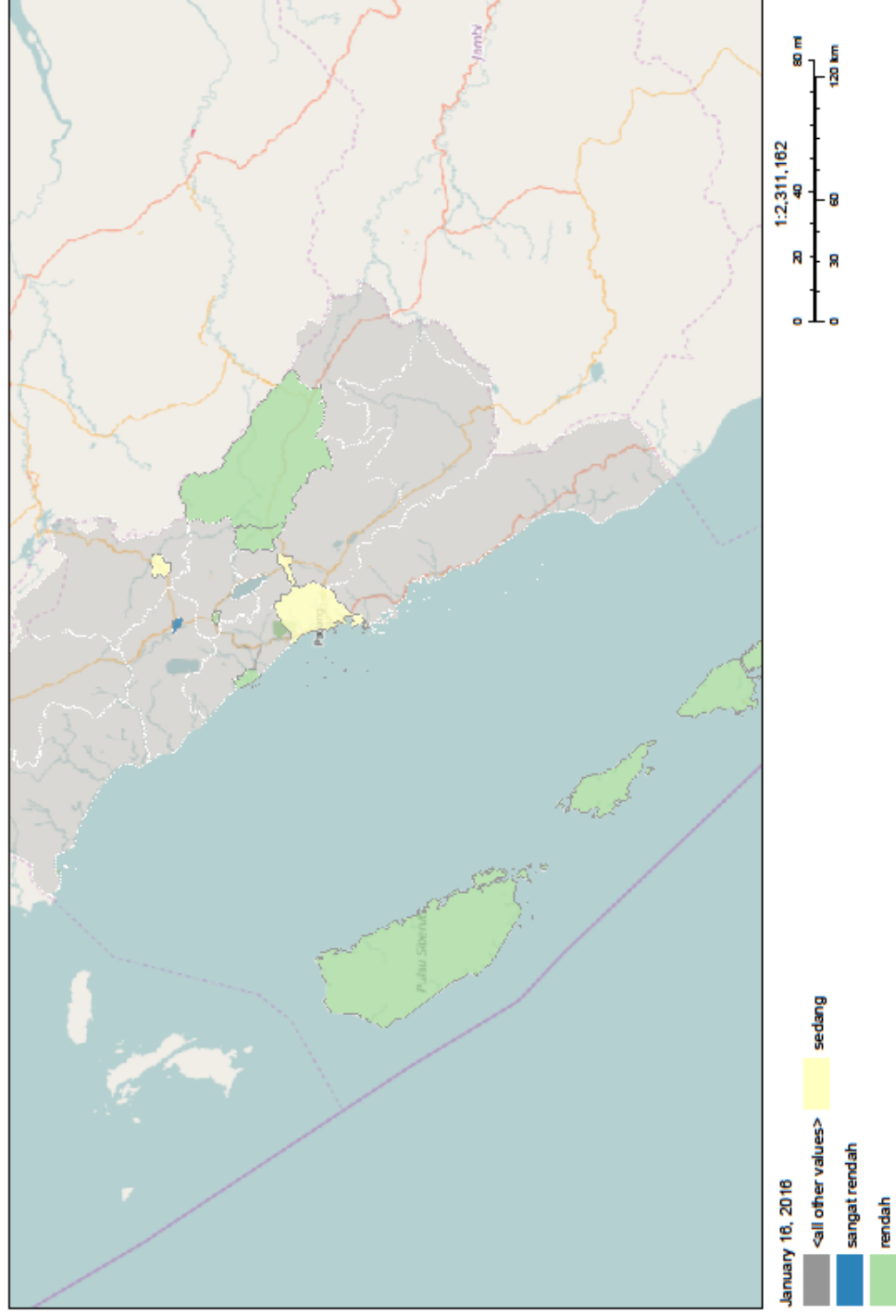
Peta PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



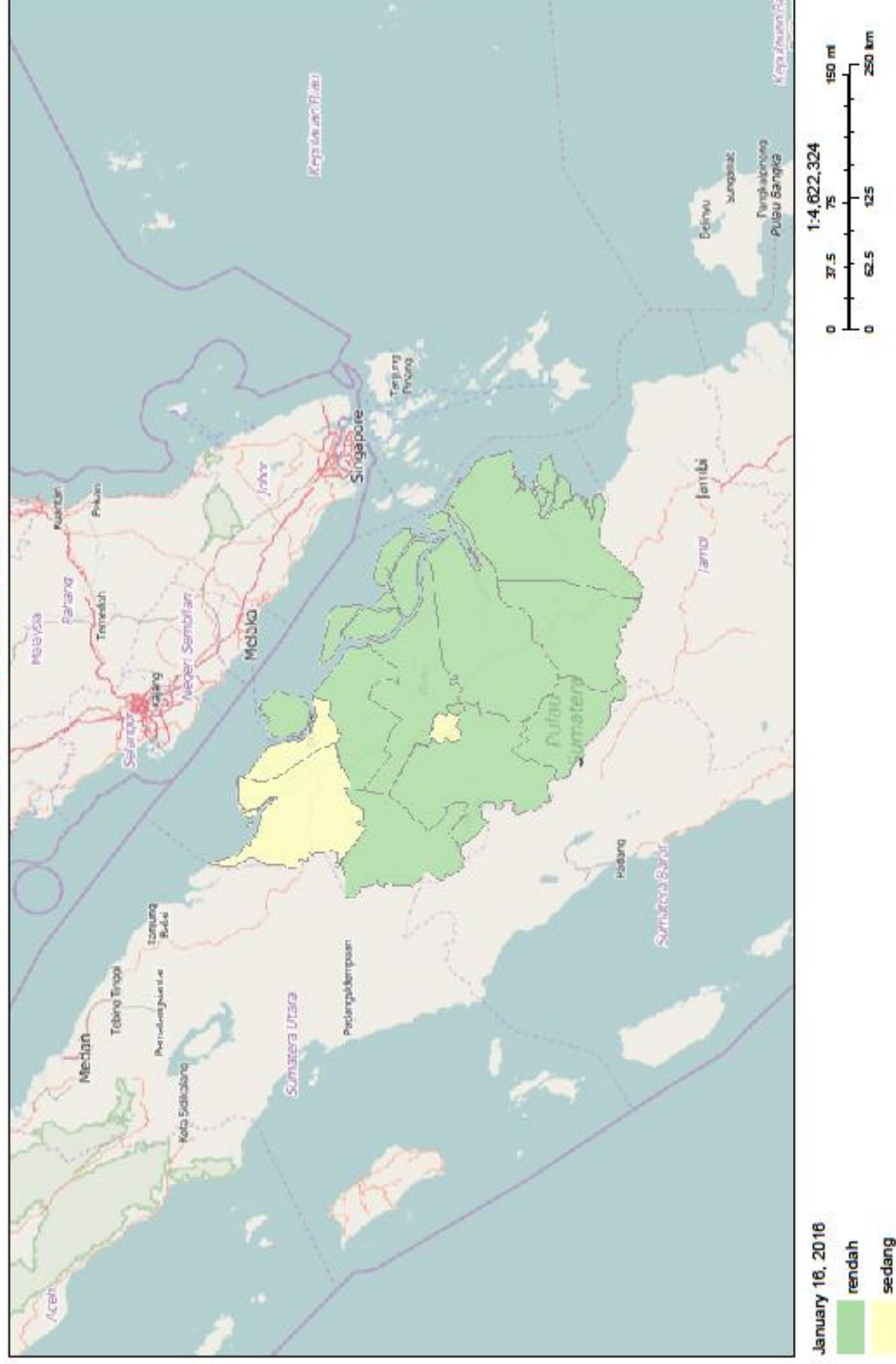
Peta PROVINSI SUMATERA UTARA



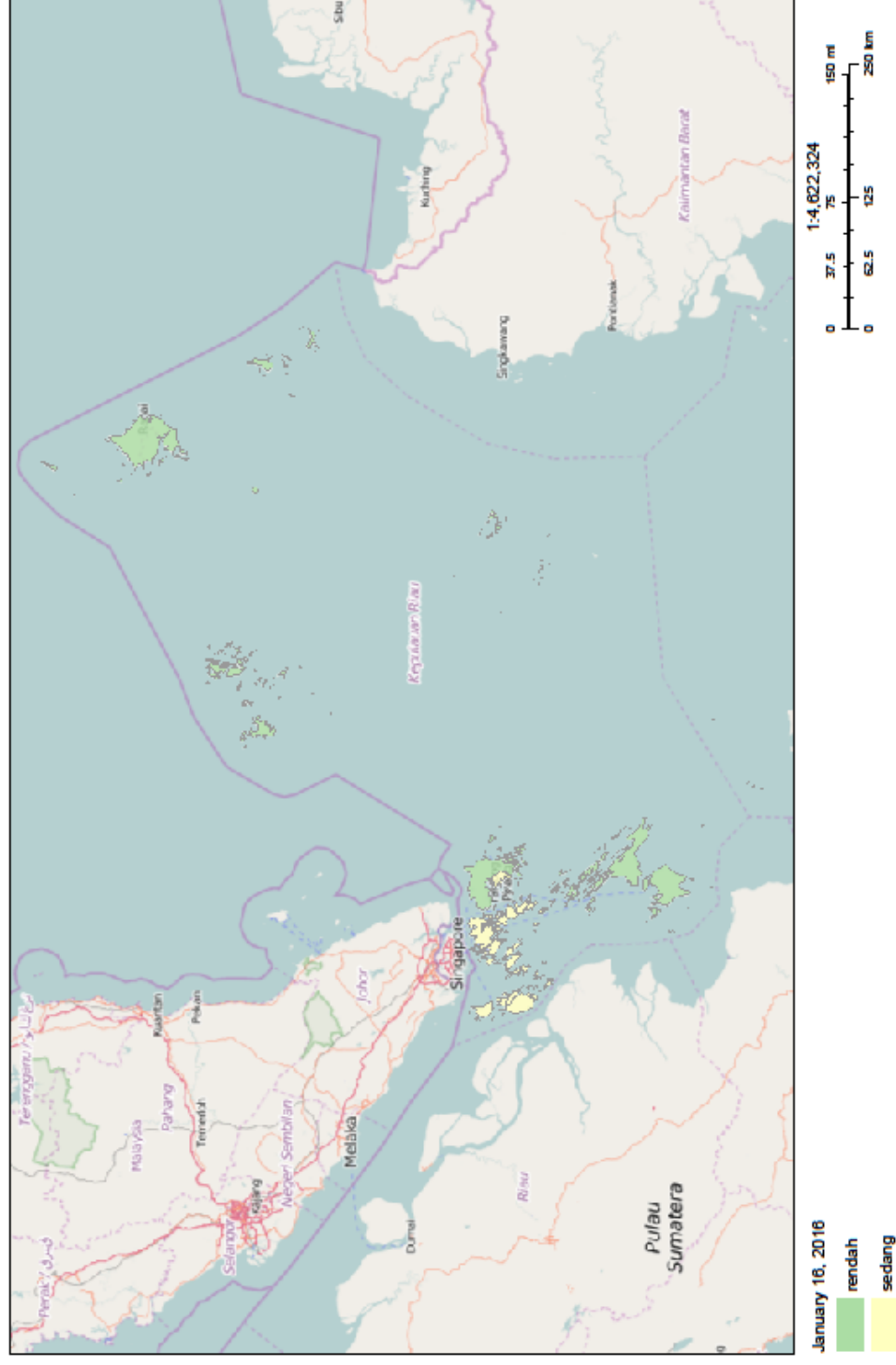
Peta PROVINSI SUMATERA BARAT



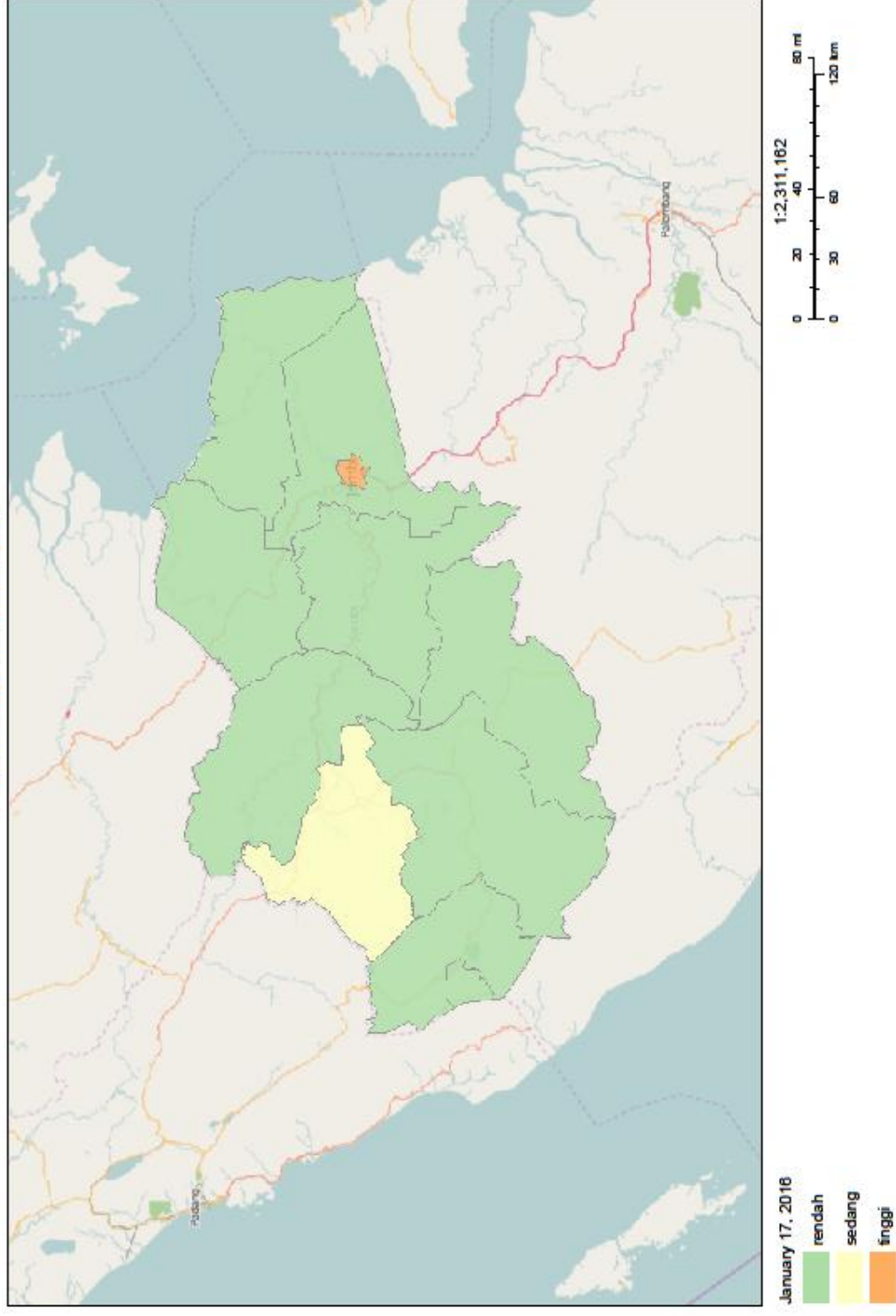
Peta PROVINSI RIAU



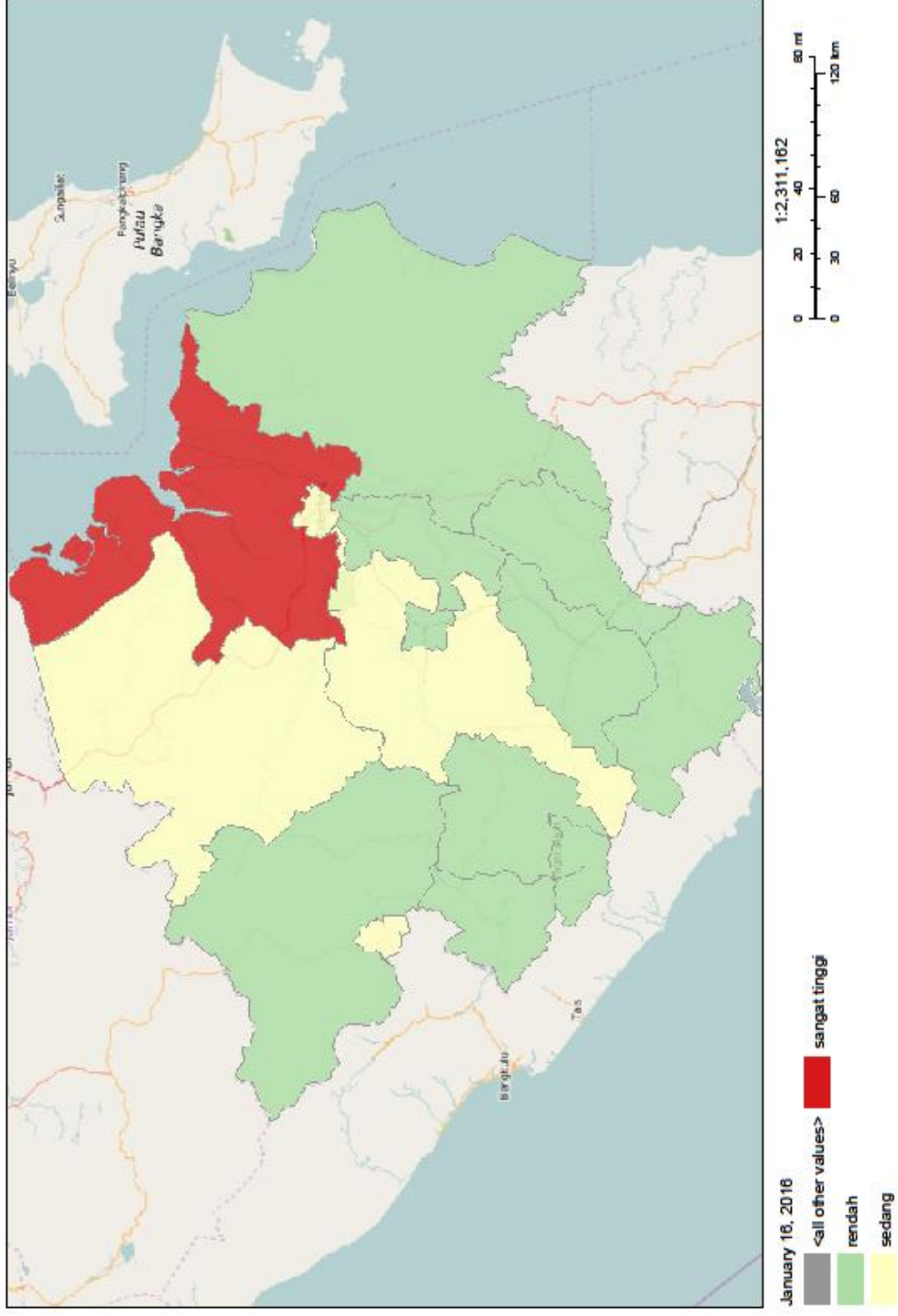
Peta PROVINSI KEPULAUAN RIAU



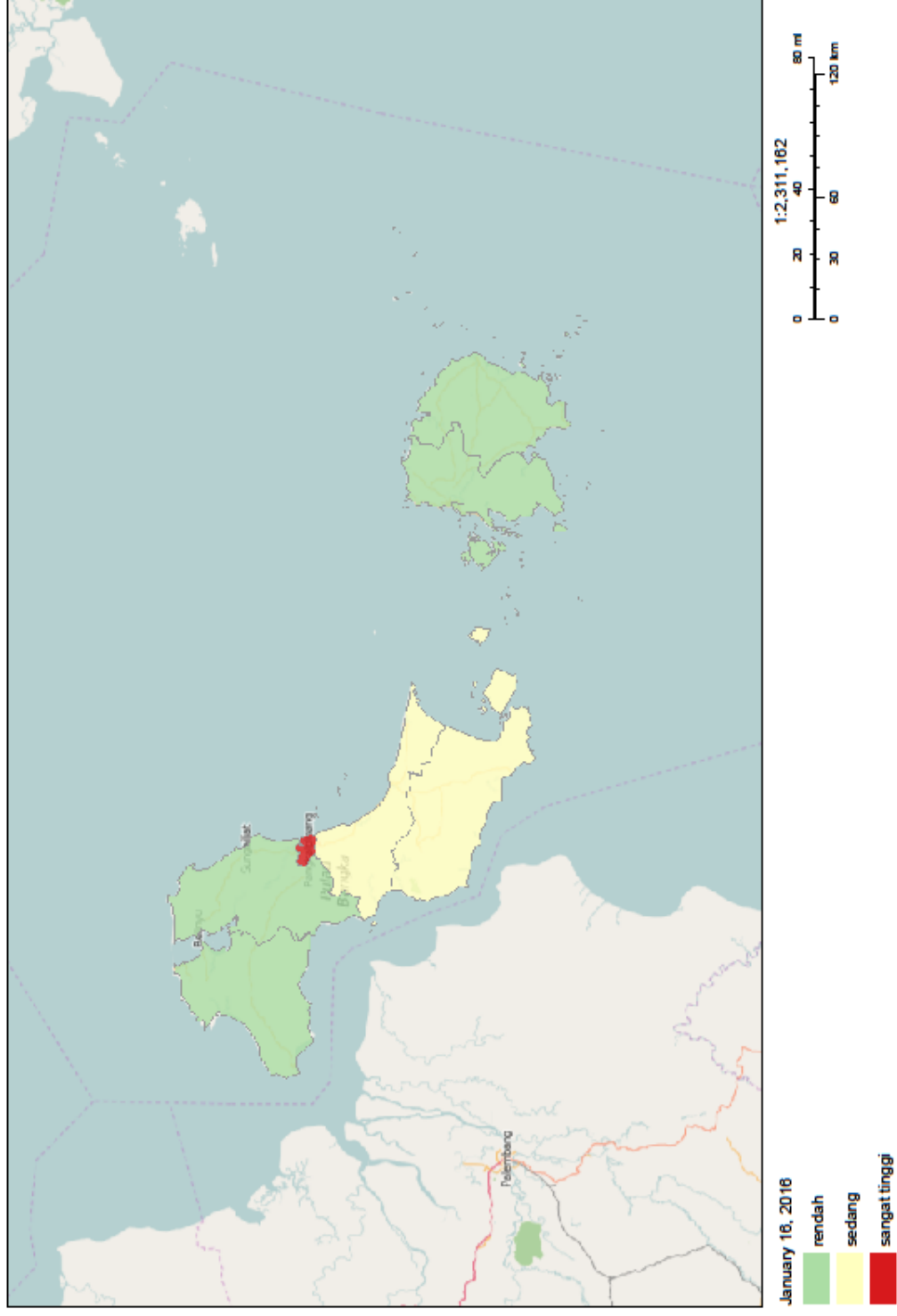
Peta PROVINSI JAMBI



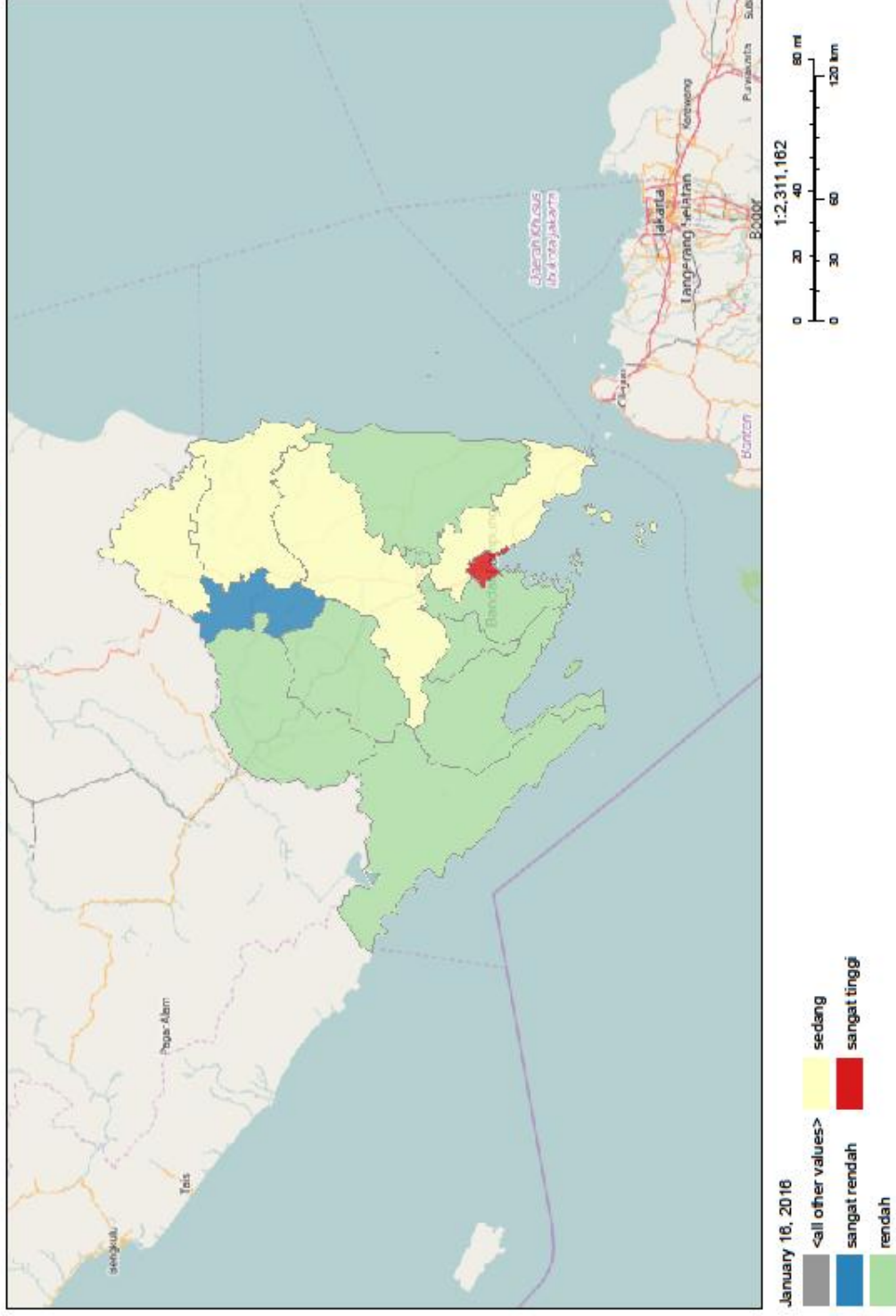
Peta PROVINSI SUMATERA SELATAN



Peta PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

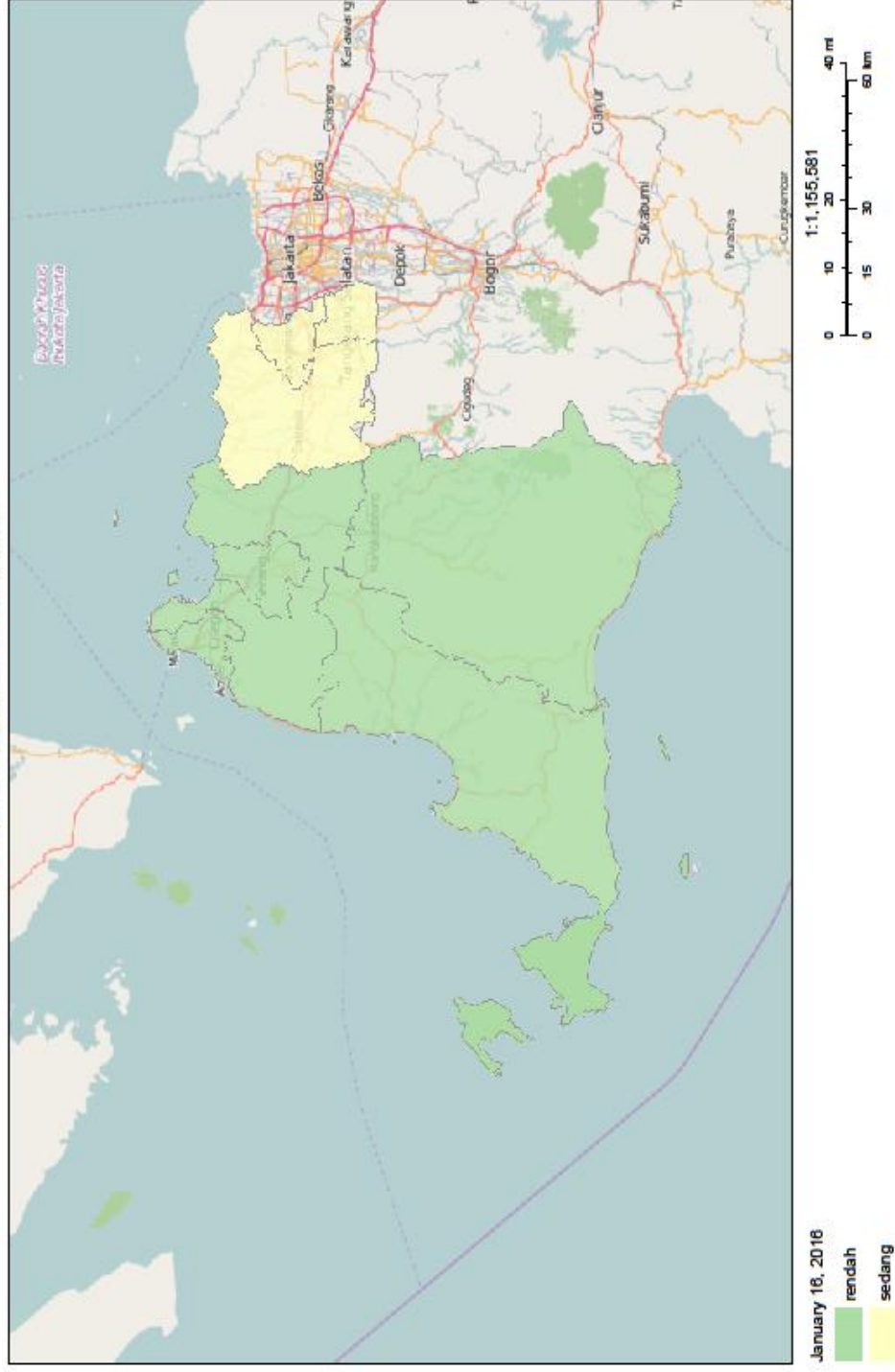


Peta PROVINSI LAMPUNG



PULAU JAWA BALI NUSA TENGGARA

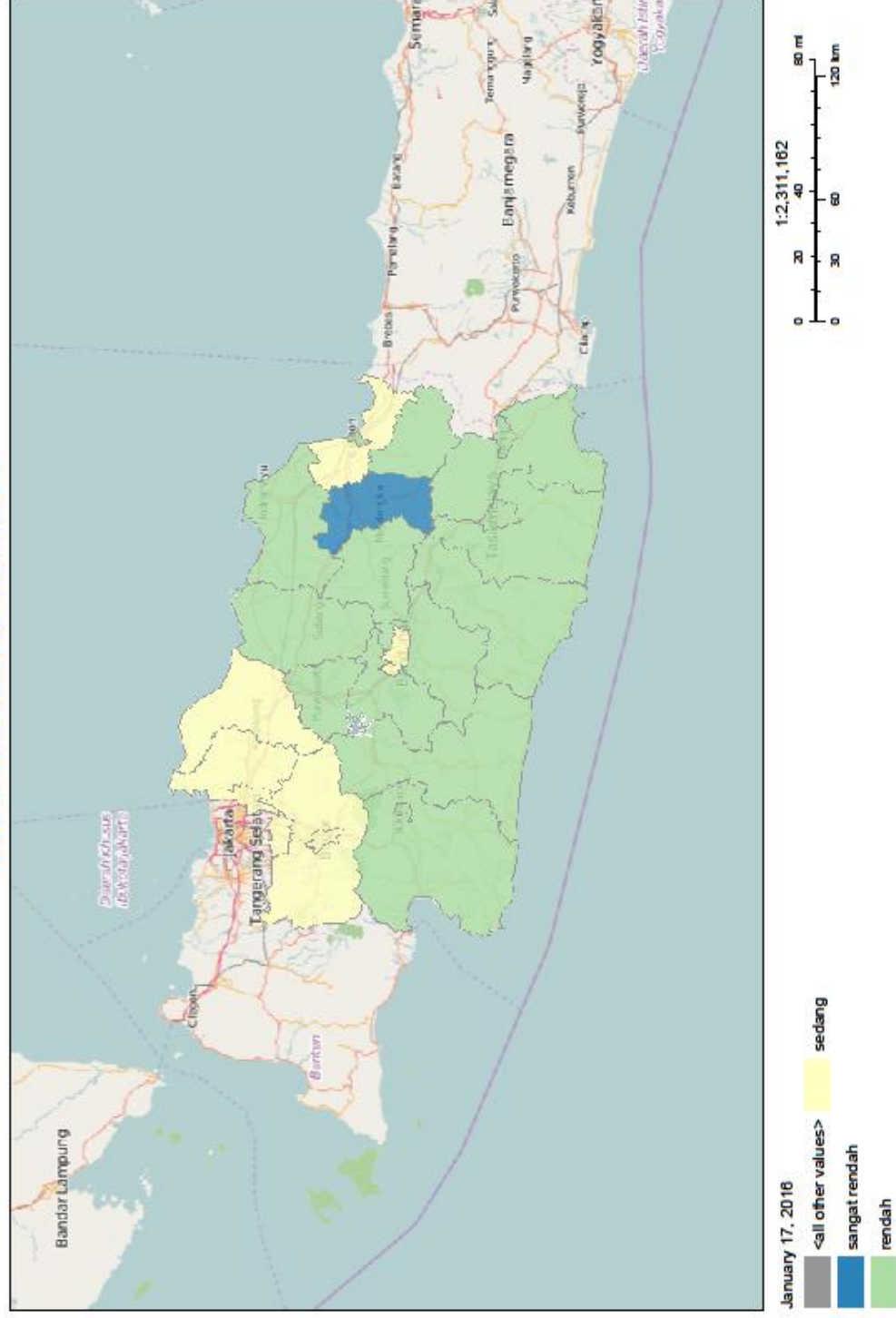
Peta PROVINSI BANTEN



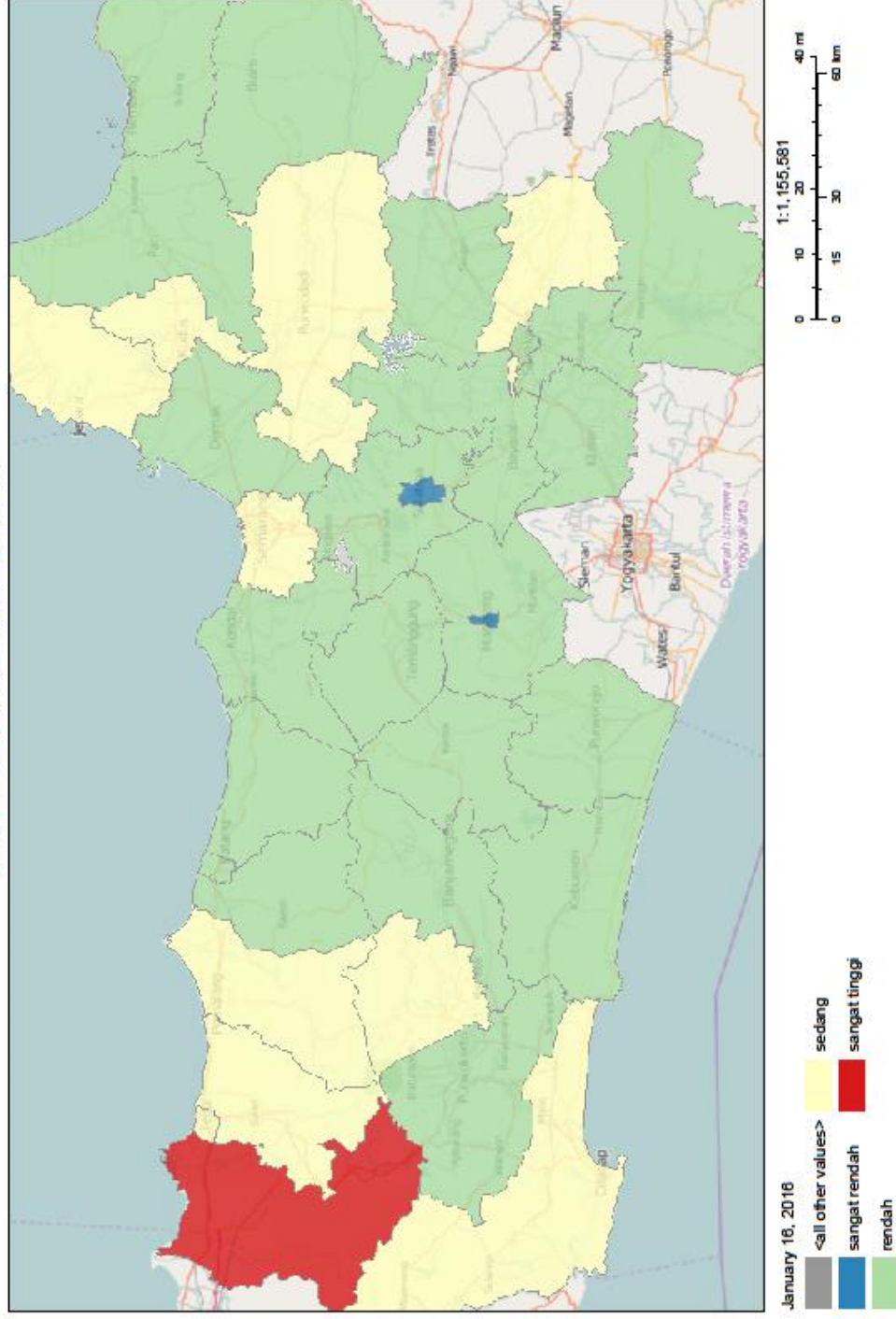
The map displays the Tangerang region in West Java, Indonesia. The four districts are color-coded: Tangerang Kota (orange), Tangerang Selatan (green), Tangerang Utara (blue), and Tangerang Barat (yellow). The map shows major roads, rivers, and surrounding areas like Bekasi, Karawang, and Serang. The Tangerang River is prominent, flowing through the region. The map also shows the location of the Tangerang International Airport and the Tangerang Port.

1:577.791

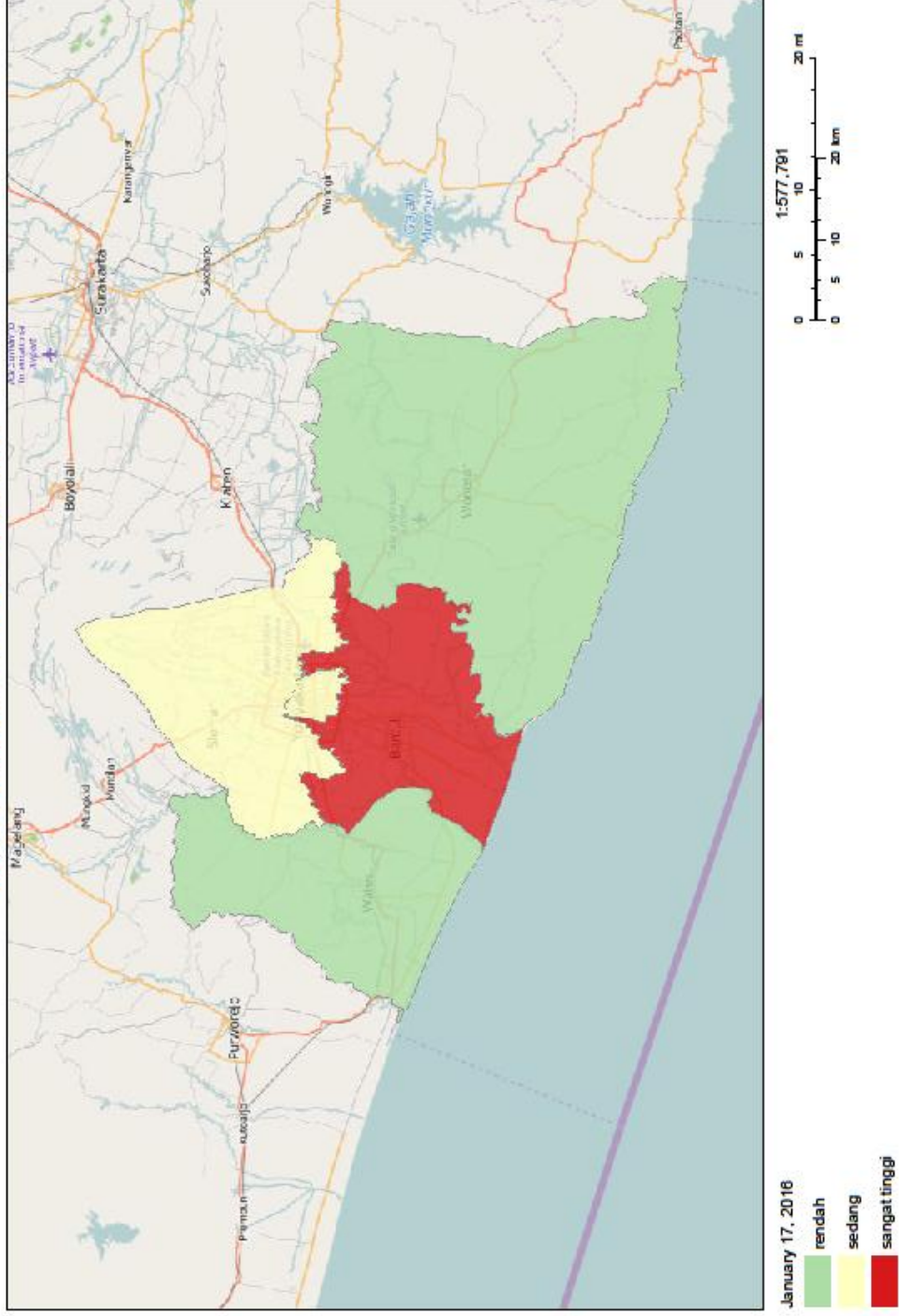
Peta PROVINSI JAWA BARAT



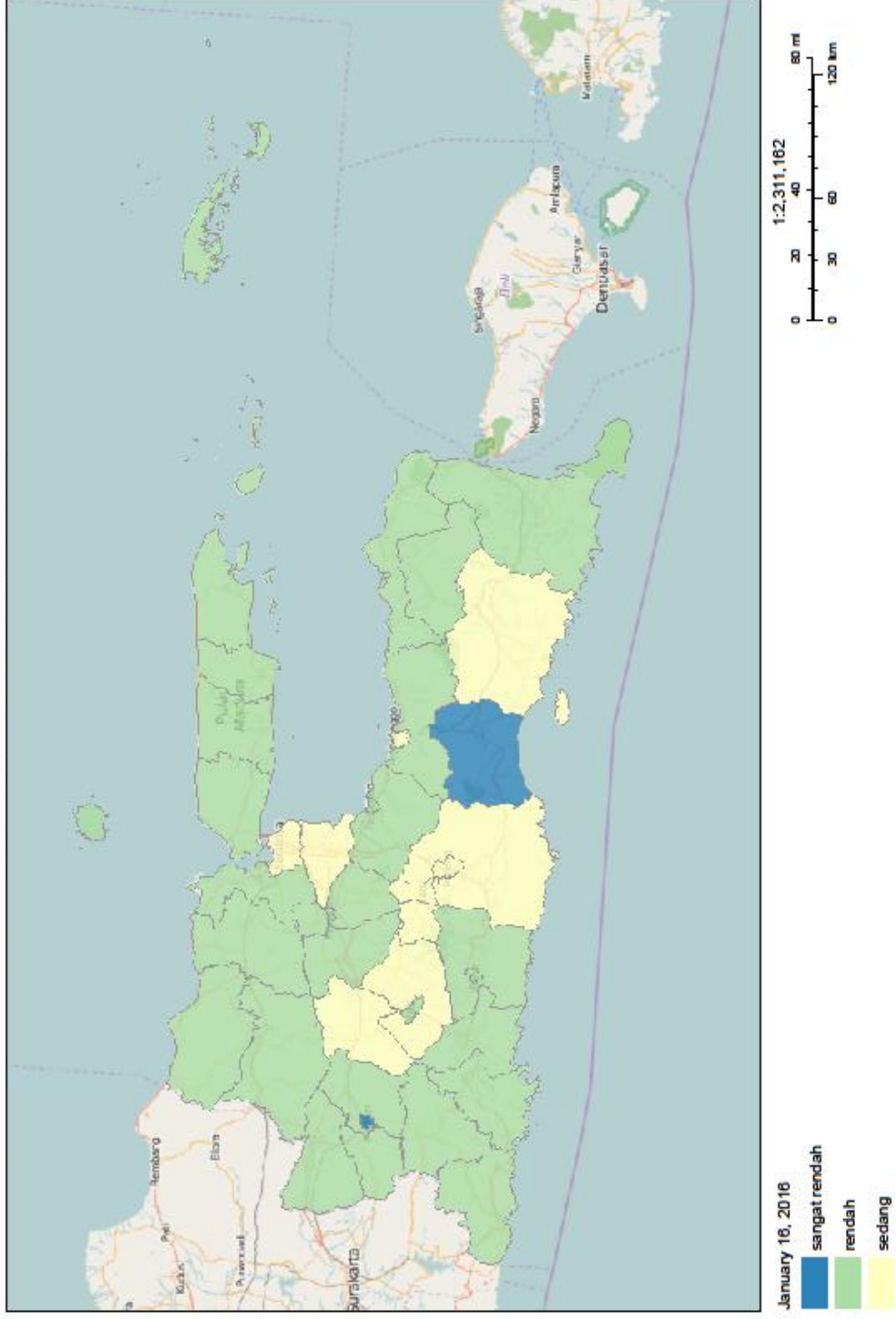
Peta PROVINSI JAWA TENGAH



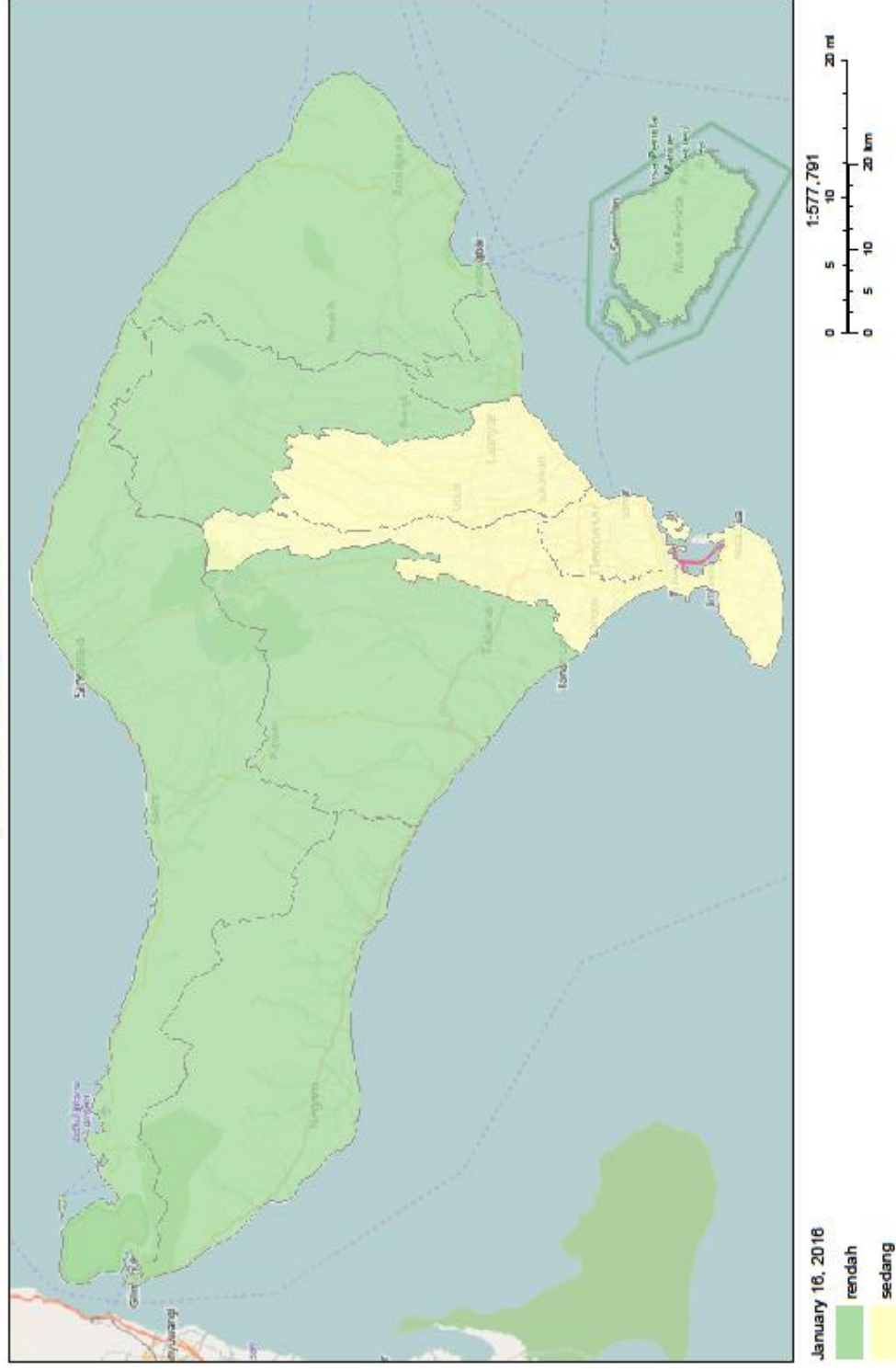
Peta PROVINSI DI YOGYAKARTA



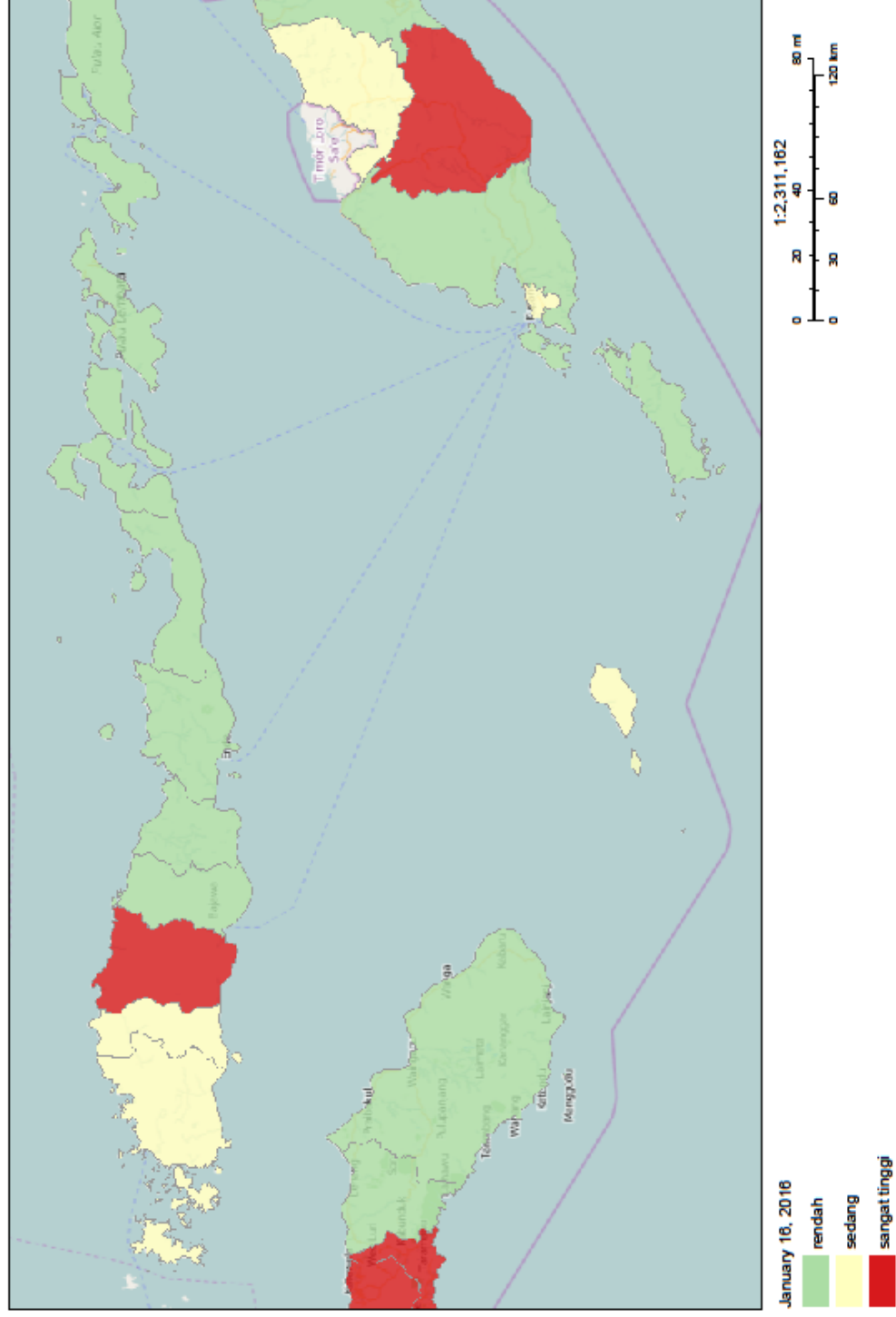
Peta PROVINSI JAWA TIMUR



Peta PROVINSI BALI

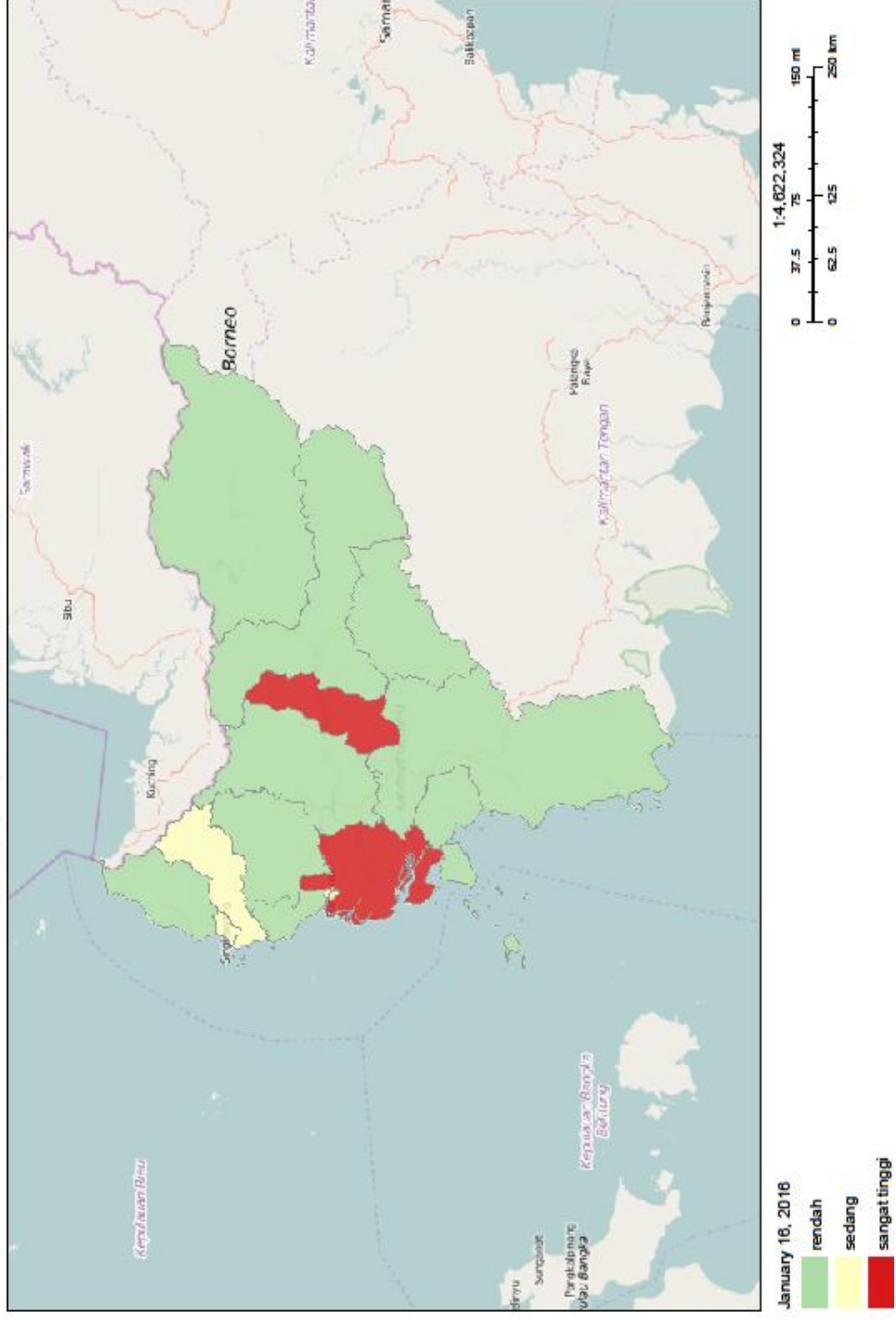


Peta PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

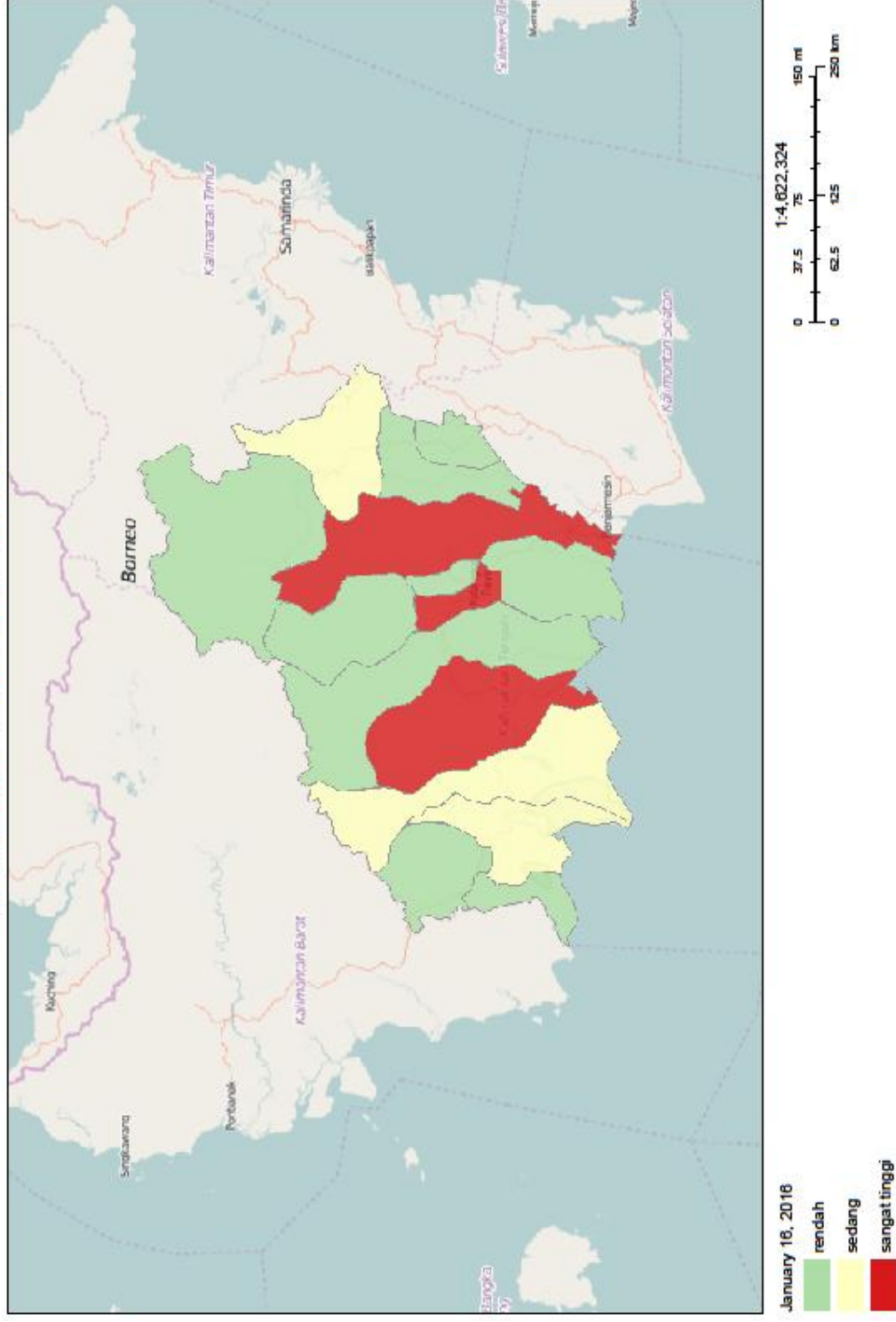


PULAU KALIMANTAN

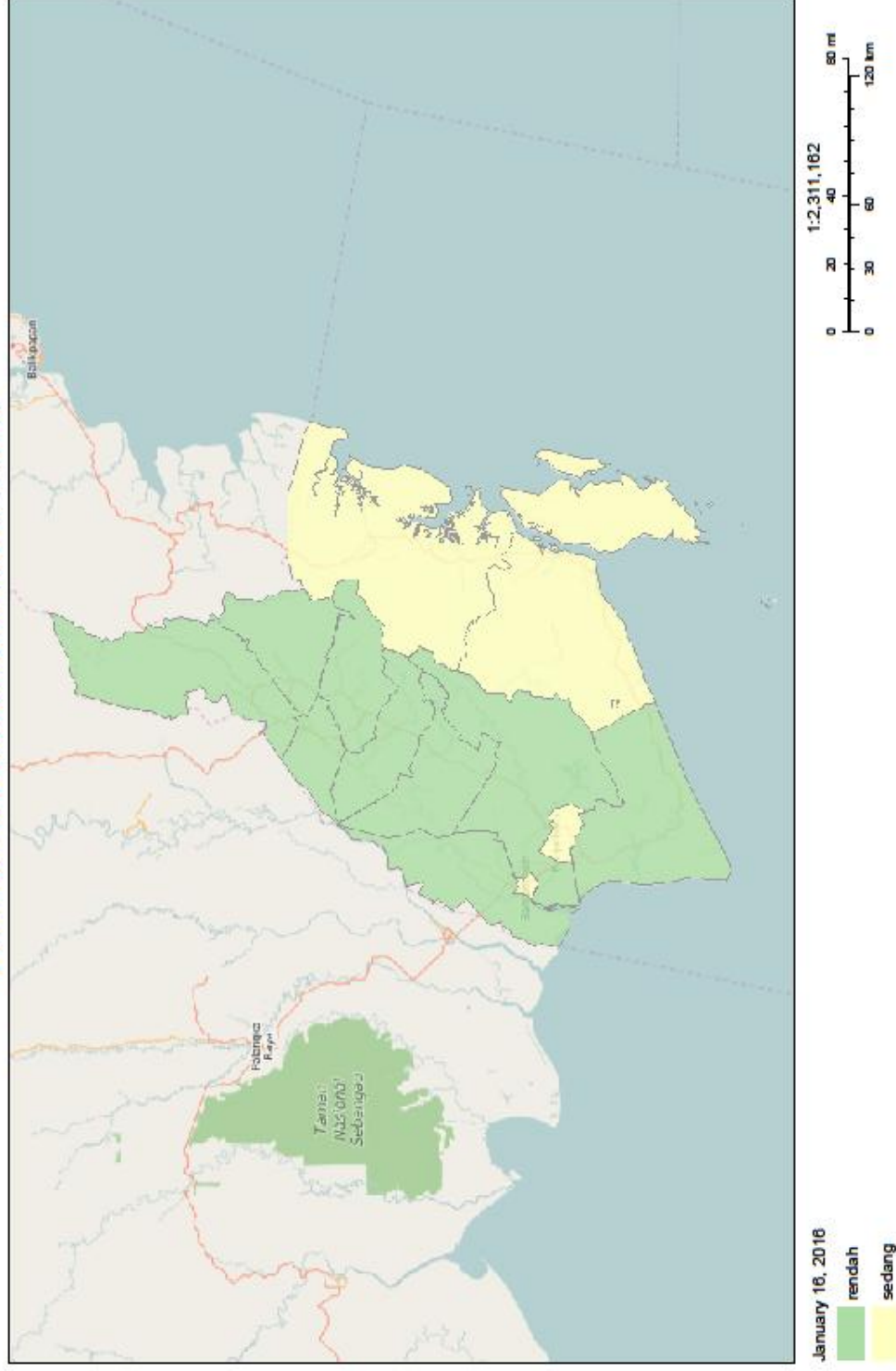
Peta PROVINSI KALIMANTAN BARAT



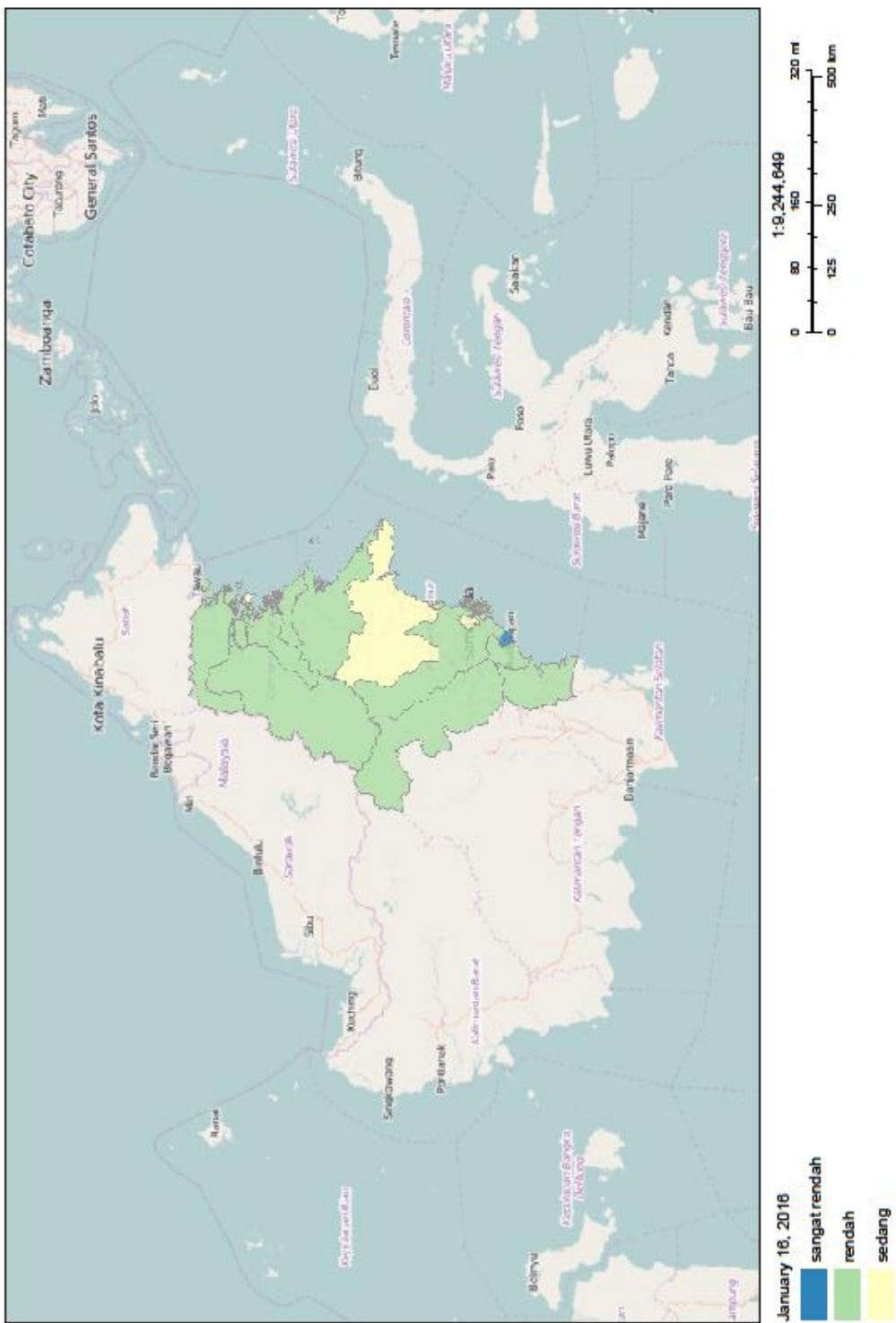
Peta PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Peta PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

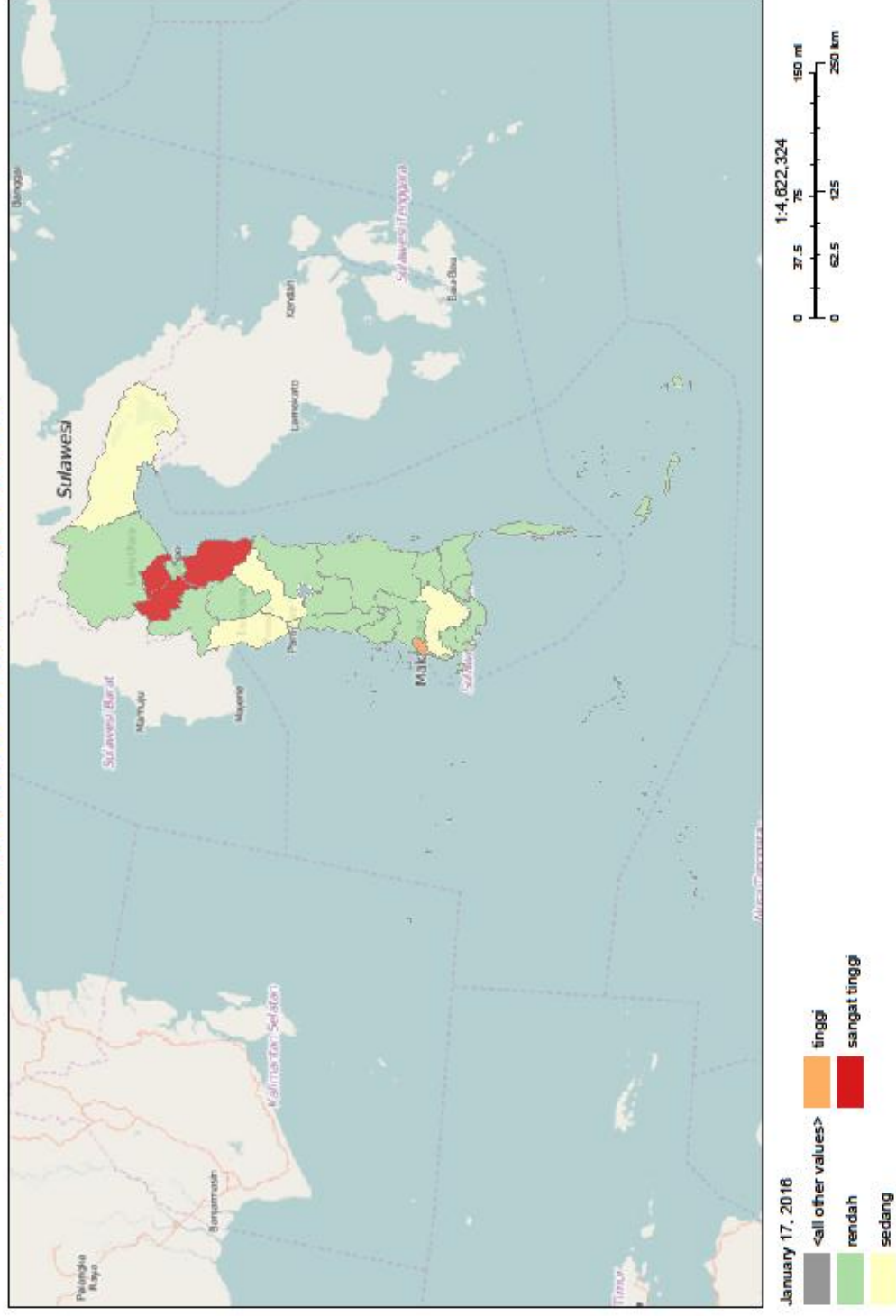


Peta PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

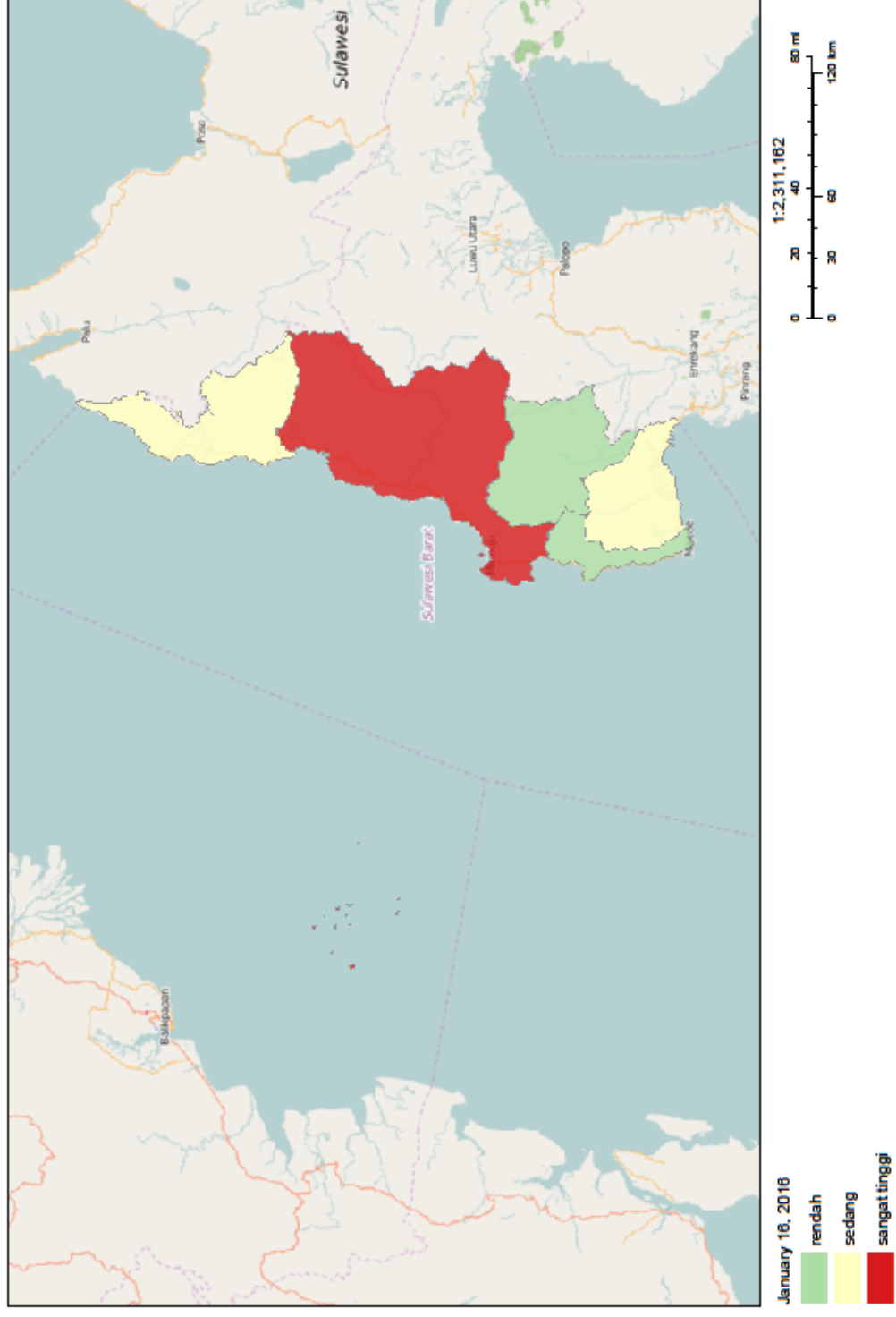


PULAU SULAWESI

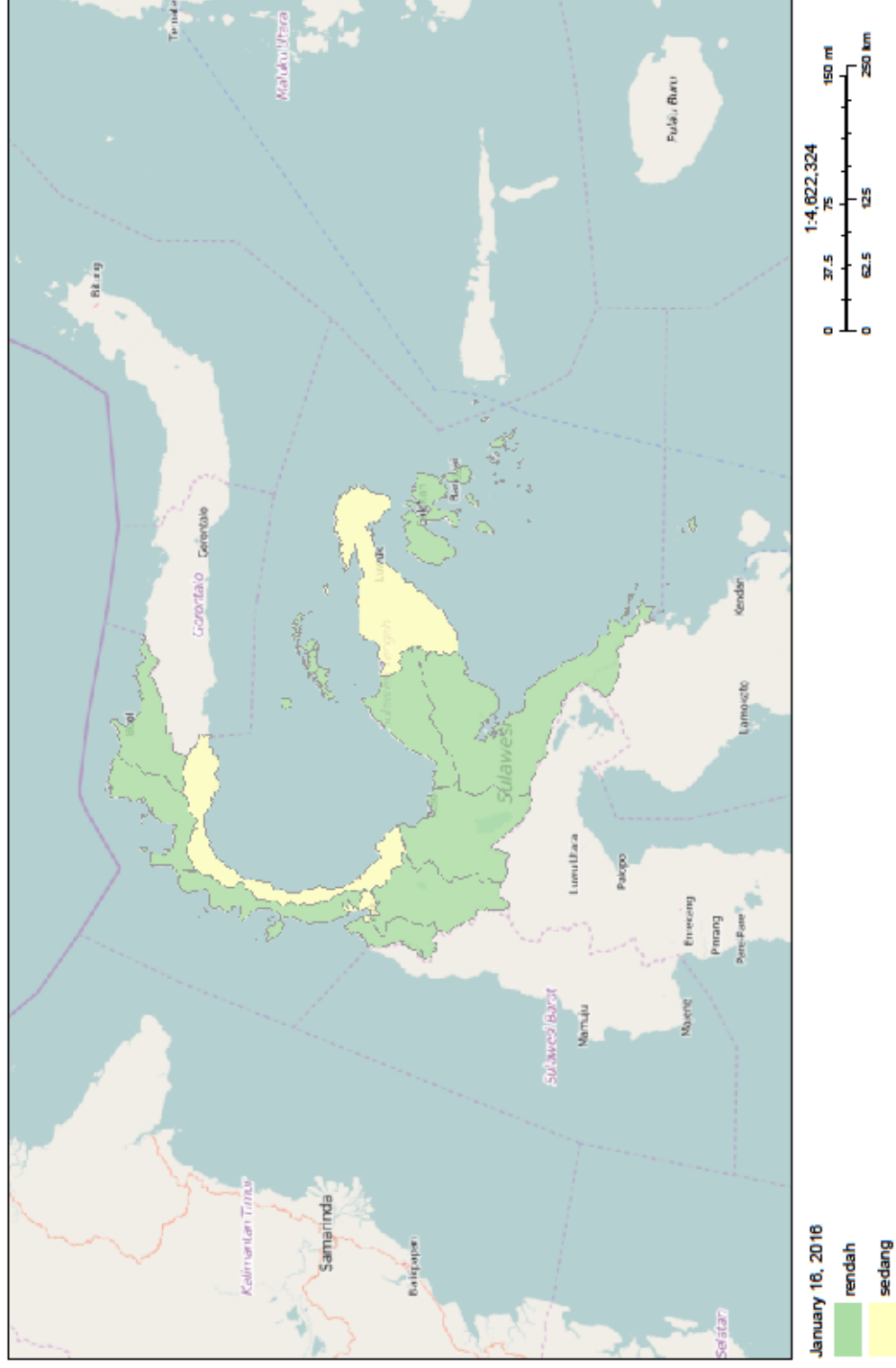
Peta PROVINSI SULAWESI SELATAN



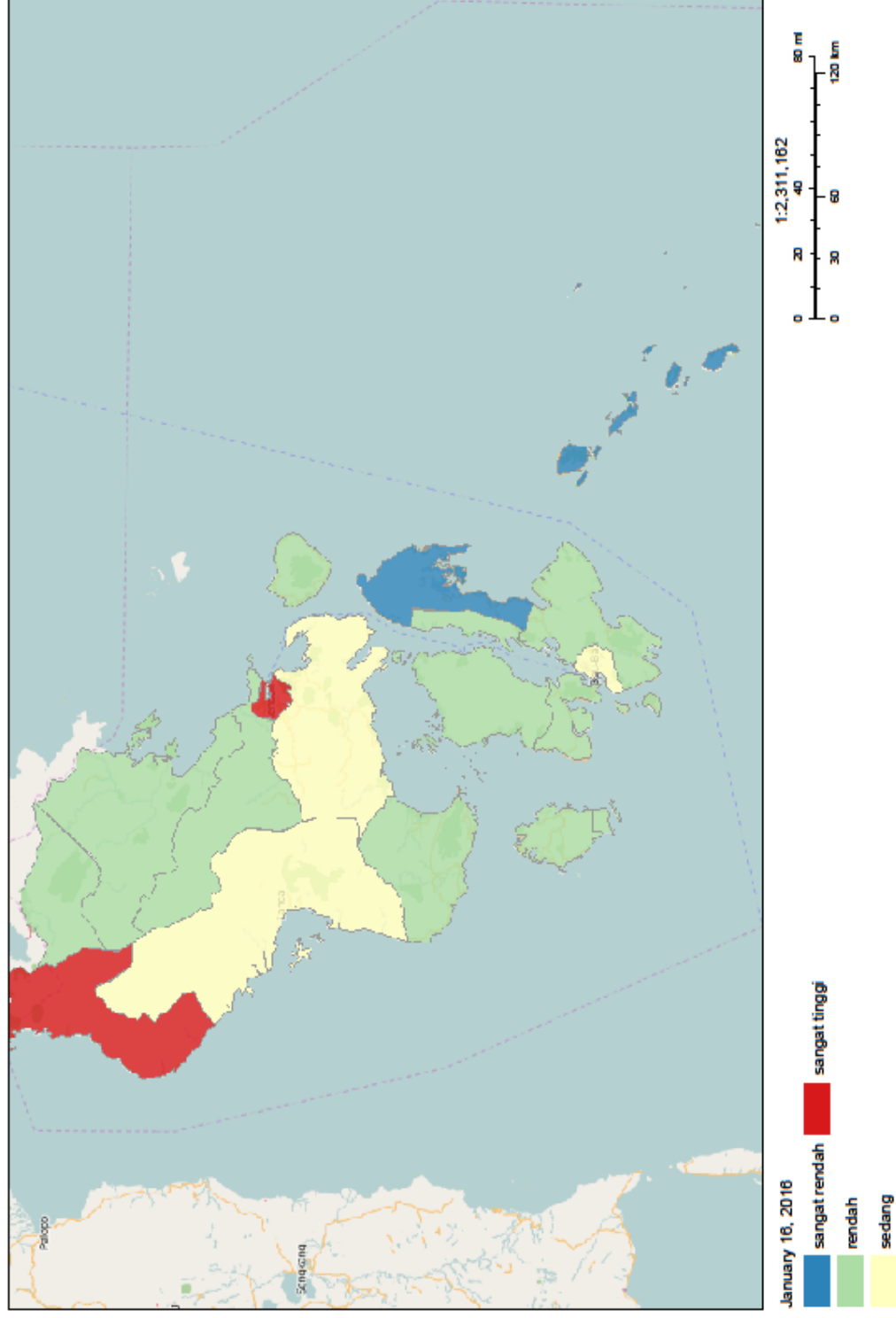
Peta PROVINSI SULAWESI BARAT



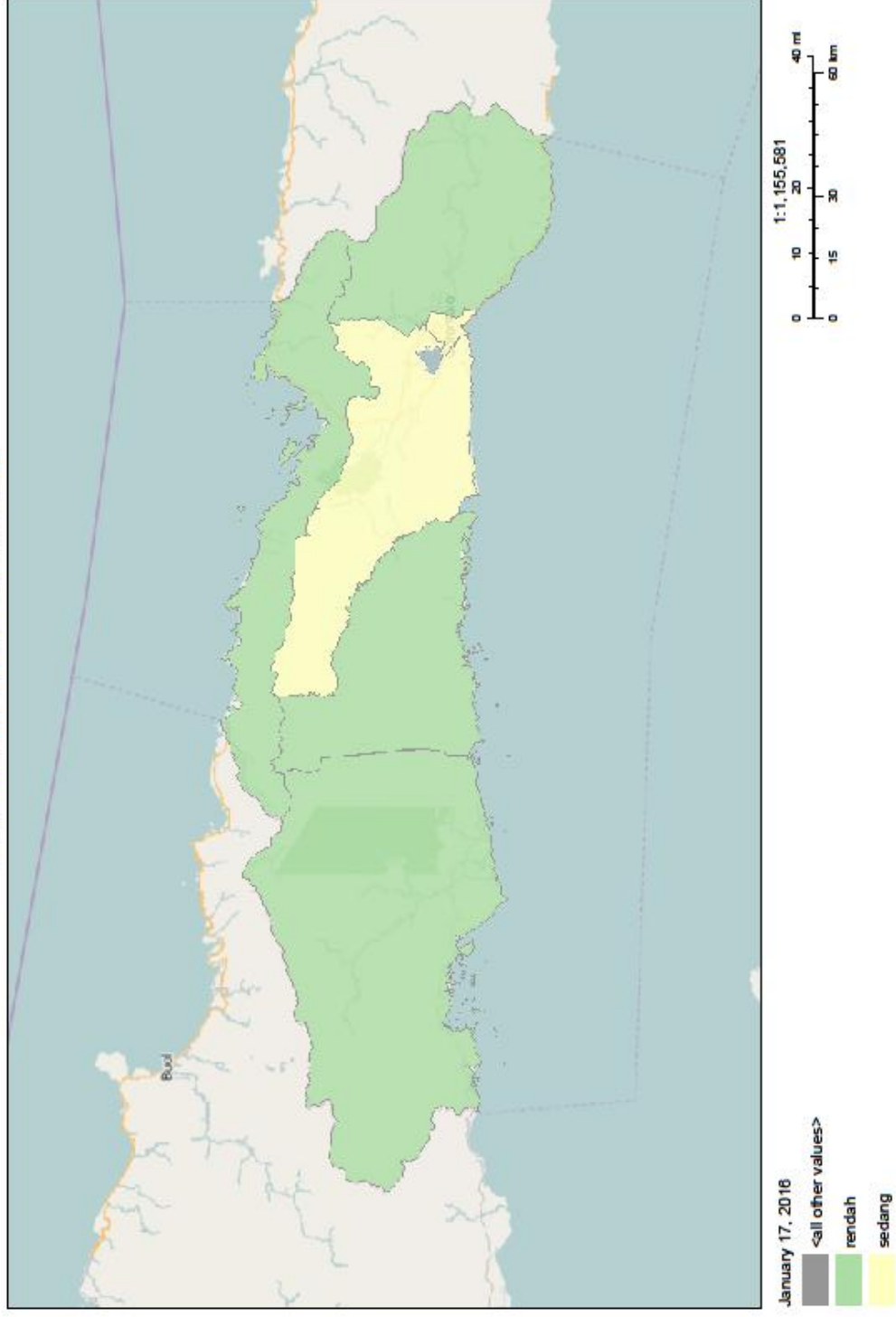
Peta PROVINSI SULAWESI TENGAH



Peta PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Peta PROVINSI GORONTALO

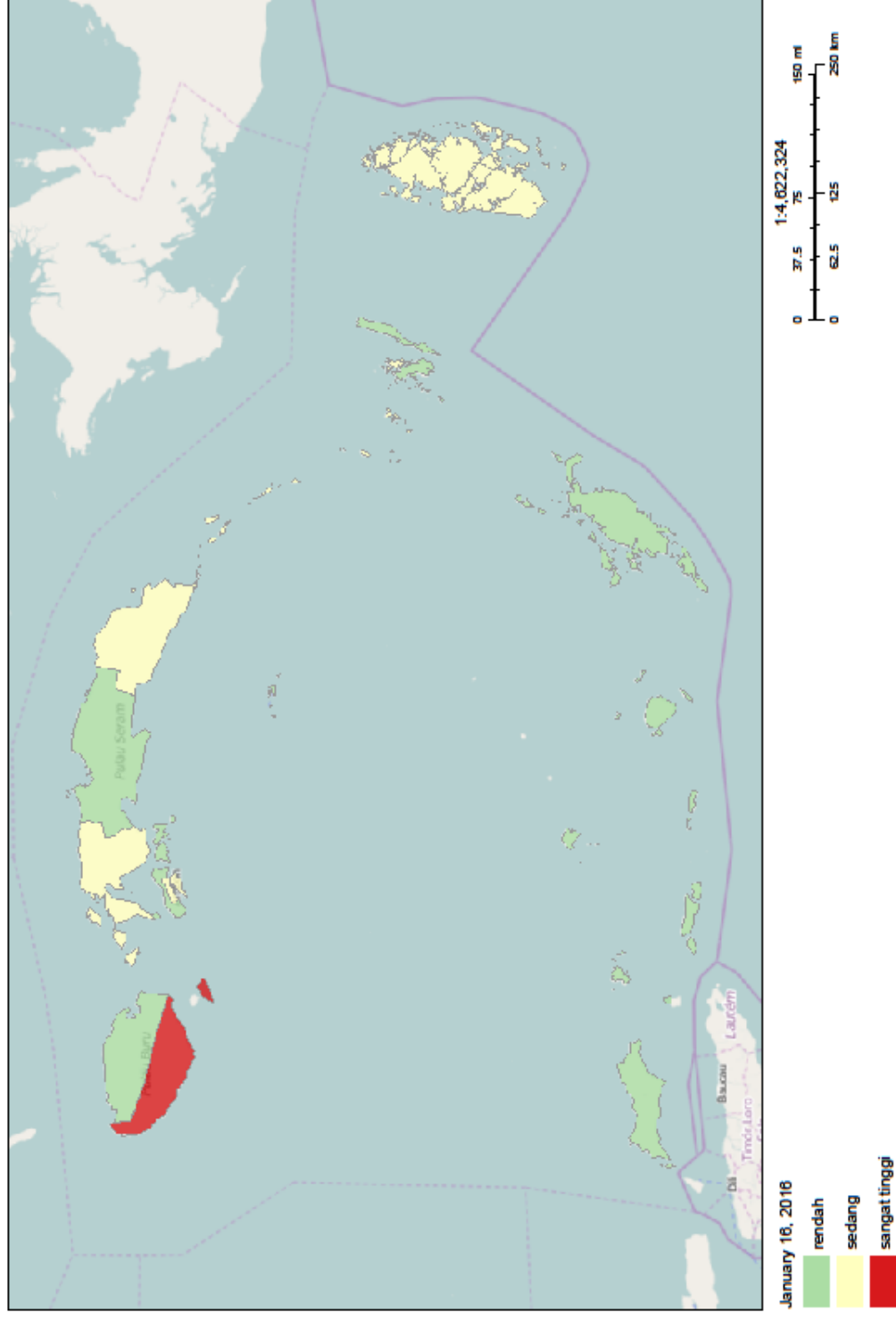


PULAU MALUKU DAN PAPUA

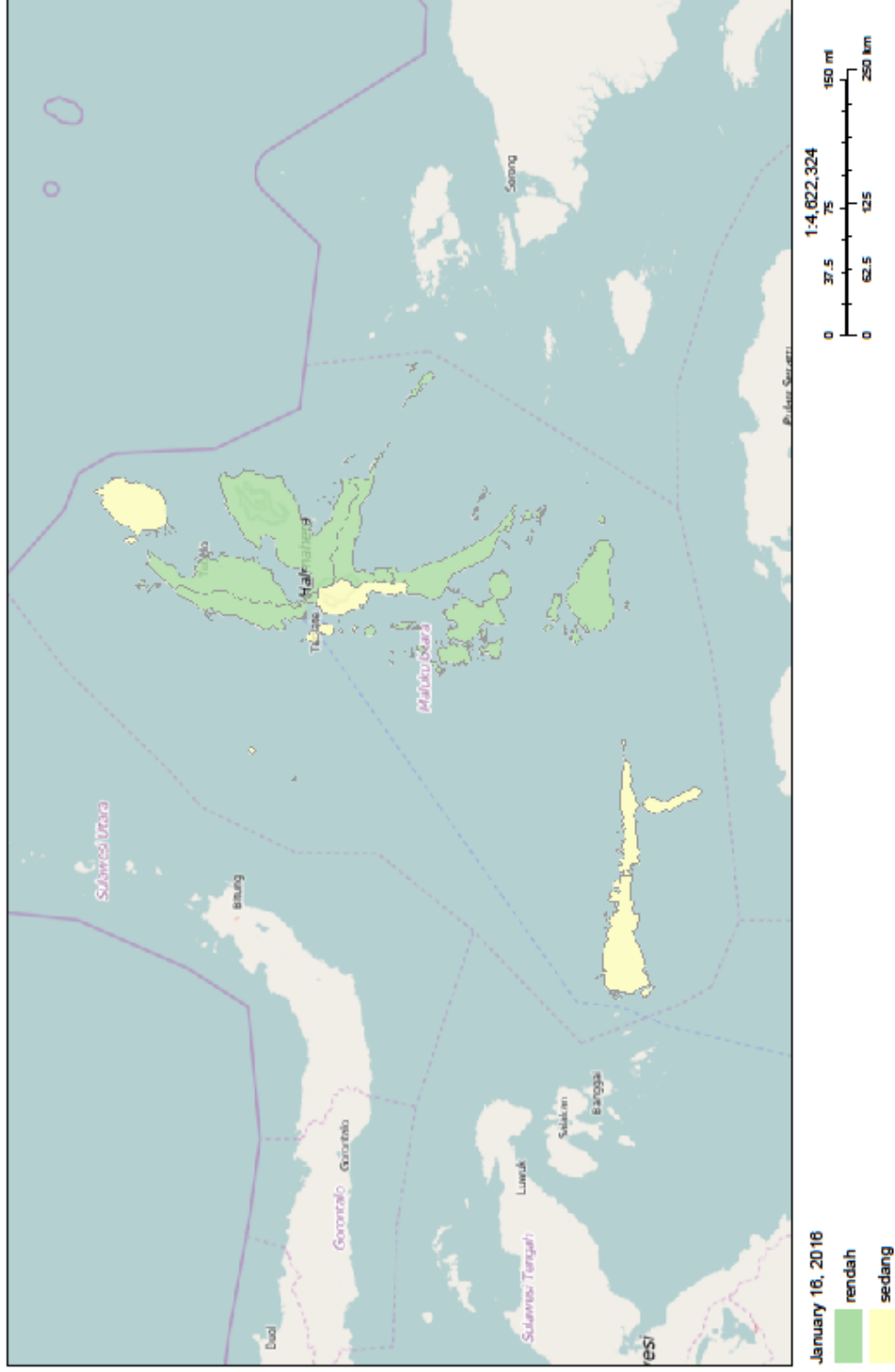
rendah
sedang



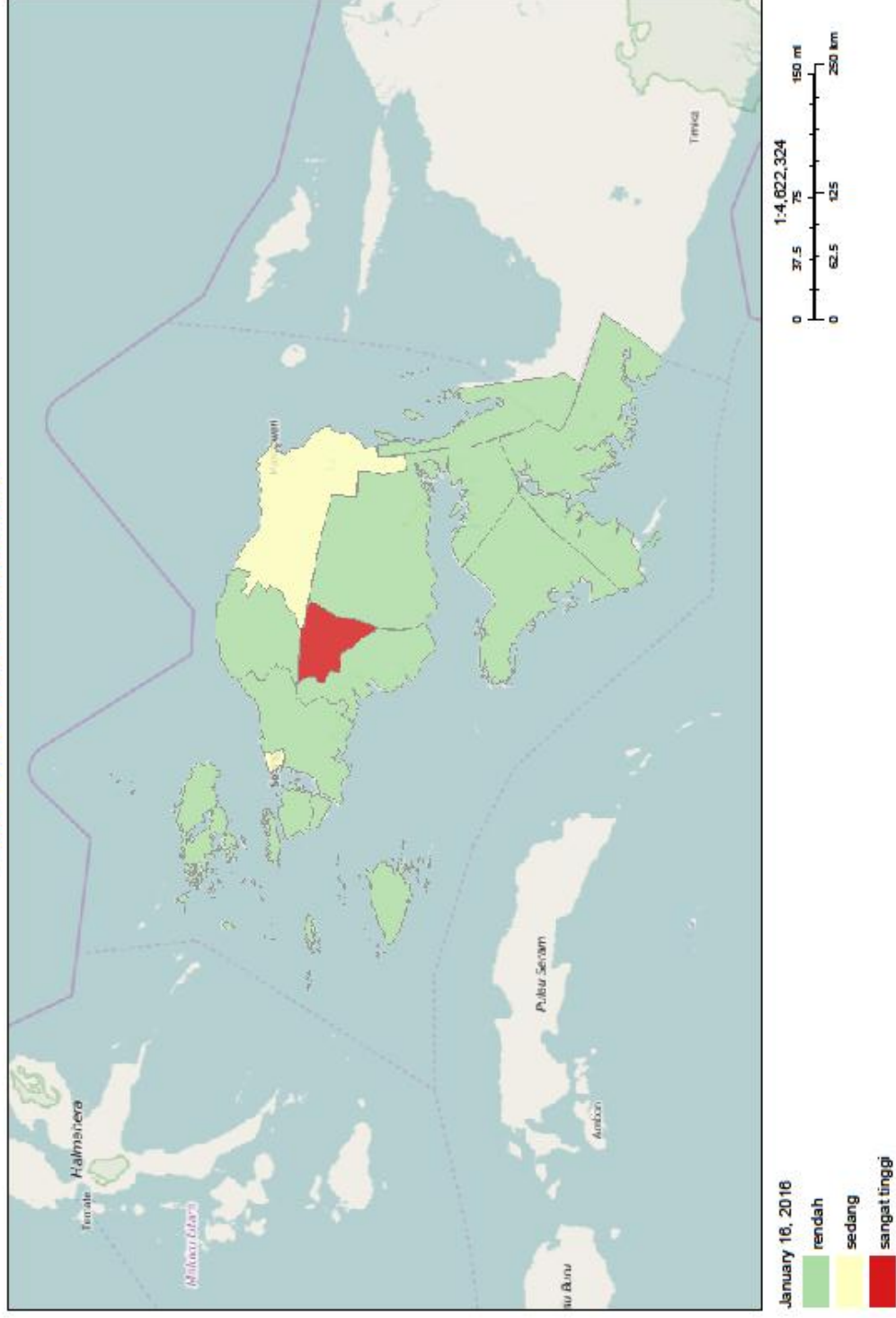
Peta PROVINSI MALUKU



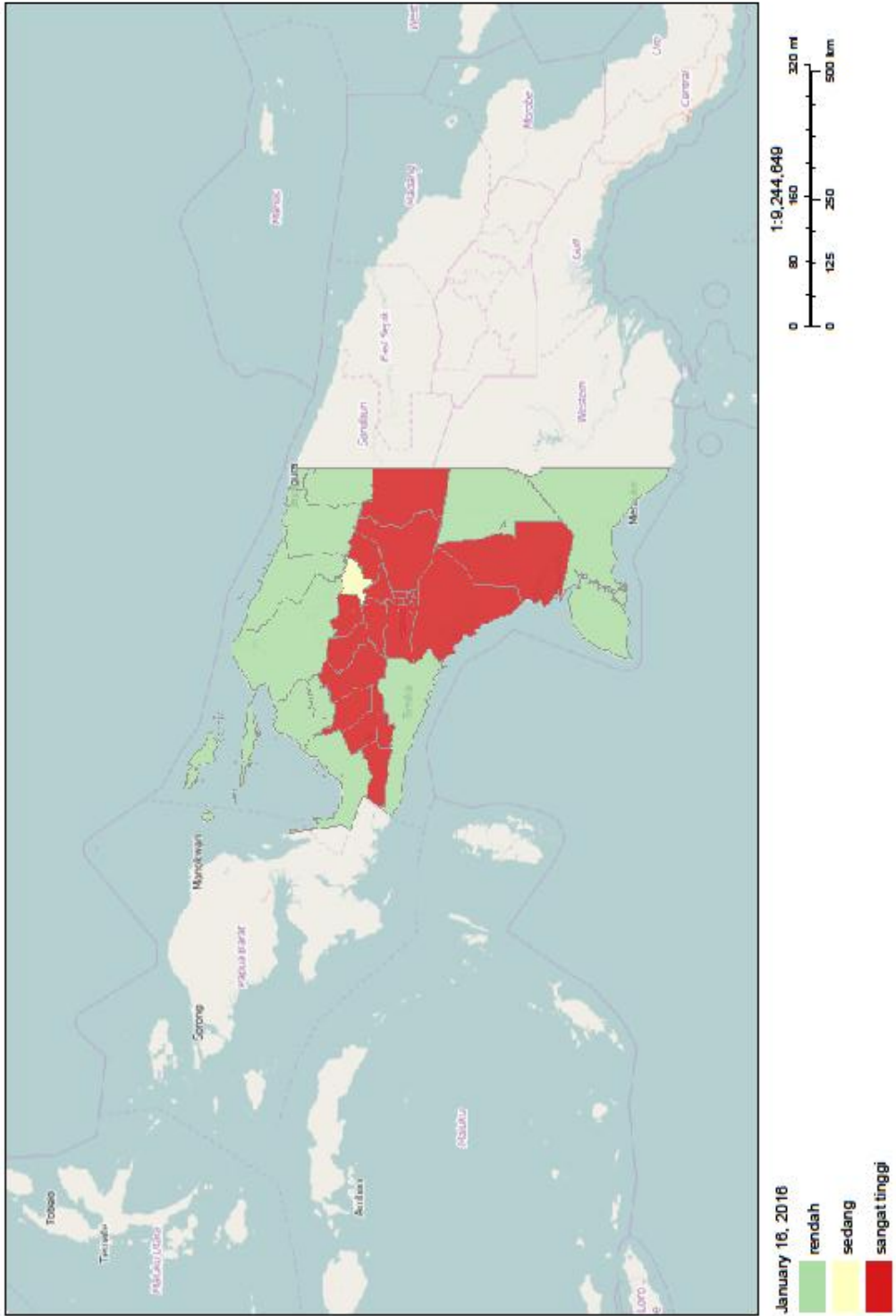
Peta PROVINSI MALUKU UTARA



Peta PROVINSI PAPUA BARAT



Peta PROVINSI PAPUA





**DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 12
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta-Indonesia
Telp.: (021) 5747053; E-mail: subdit1.api.ppi@gmail.com

JAKARTA